



KAJIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP):

STRATEGI PENJANGKAUAN
ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) UNTUK
MENGIKUTI PENDIDIKAN MELALUI
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

STRATEGI PENJANGKAUAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP)

Tim Penyusun :

Dr. Herlinawati
Dra. Effi Heriyati
Sudiyono, S.Pd., M.Pd.
Arie Budi Susanto, S.K.M.

ISBN : 978-602-0792-00-2

Penyunting :

Sabar Budi Raharjo, Dr., M.Pd.
Ir. Yendri Wirda, M.Si.
Nur Listiawati, SS, M.Ed.

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, November 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

NIP 196710291993031002

KATA PENGANTAR

Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) masih belum tereksplorasi dengan baik, padahal jumlah anak tidak sekolah masih cukup besar. Anak Tidak Sekolah dikategorikan sebagai anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selain itu, mereka yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) karena berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, dan sosial.

Saat ini, kebanyakan program pendidikan masih terfokus kepada anak yang masih berada di dalam lembaga pendidikan (preventif), sehingga perlu adanya kebijakan dan program yang juga dapat menjangkau anak tidak sekolah. Pemerintah melalui berbagai program berkomitmen untuk menjangkau anak tidak sekolah beberapa di antaranya melalui Program Indonesia Pintar. Pada tahun 2017, dari 4,1 juta keseluruhan total ATS (Data TNP2K), masih ada sekitar 3 juta-an anak yang masih belum bisa dipetakan keberadaannya dan belum mendapatkan manfaat dari KIP, KIP tersebut tidak sampai kepada mereka karena tidak jelas keberadaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengkaji permasalahan anak tidak sekolah agar mereka bisa kembali ke sekolah formal atau ke nonformal melalui Program Indonesia Pintar, dan apa yang menjadi faktor penyebabnya, serta bagaimana strateginya agar anak putus sekolah tersebut dapat sekolah kembali.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu persiapan, pelaksanaan hingga terselesaikannya studi ini. Temuan-temuan, analisis, serta saran kebijakan yang dihasilkan dari studi ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang strategi penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mengikuti pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Jakarta, November 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Kebijakan.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Hasil yang diharapkan	17
E. Limitasi.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Kebijakan Program Indonesia Pintar.....	18
1. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	20
2. Mekanisme Pengusulan.....	22
3. Mekanisme Penetapan Penerima.....	25
4. Pemanfaatan Dana PIP	25
B. Pembiayaan Pendidikan	26
C. Konsep Kemiskinan	31
D. Sekolah Pendidikan Nonformal dan Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah (ATS)	32
1. Sekolah Pendidikan NonFormal (SPNF)	32
2. Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS)	35
E. Hasil Penelitian Terdahulu	48

F. Kerangka Pikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Populasi dan Sampel	52
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	52
1. Penentuan sampel Kabupaten/Kota.....	52
2. Penentuan Sampel Lembaga Pendidikan	56
3. Pemilihan Responden.....	56
D. Teknik Pengambilan Data	57
E. Teknik Analisis Data	58
BAB IV	
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Pendataan ATS	60
1. Karakteristik ATS Berdasarkan Kelompok Umur	68
2. Karakteristik ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	70
3. Karakteristik ATS Berdasarkan latar belakang status bersekolah	72
B. Faktor Penyebab ATS	74
C. Upaya dan Motivasi ATS Kembali “Bersekolah”	75
BAB V	
SIMPULAN DAN SARAN	79
A. Simpulan.....	79

1. Pendataan	79
2. Faktor-faktor Penyebab Anak Tidak Sekolah .	81
3. Upaya menarik ATS kembali ke sekolah.....	82
B. Saran Kebijakan	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sebagai bentuk perwujudan Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Indonesia Pintar diharapkan dapat meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop-out*).

Secara umum program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat kurang mampu atau miskin.

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, dengan maksud untuk menjamin akses layanan Pendidikan agar dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat yang memiliki kendala ekonomi, melalui pemberian bantuan biaya pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin/rentan miskin. Lebih spesifik tujuan program ini adalah: (1) meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan

pendidikan akibat kesulitan ekonomi; (3) menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan (Dikdasmen, 2015).

Kondisi yang ada, saat ini disparitas angka partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi, angka partisipasi kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Oleh karena itu adanya kebijakan Program Indonesia Pintar diharapkan dapat menurunkan tingginya angka tidak melanjutkan dan tingginya angka putus sekolah (*drop-out*), sehingga dapat meningkatkan APK.

Pemerintah terus berupaya menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan APK pendidikan dasar dan menengah pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 target capaian APK SD 91,3%, SMP 111,0%, dan SMA 79,2%. Sampai dengan tahun 2019 pemerintah menargetkan capaian APK SD 114,1%, SMP 106,9% dan SMA 91,6% (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Target Capaian APK SD, SMP, dan SMA Tahun 2019

DATA PARTISIPASI PENDIDIKAN						
TARGET	SD		SMP		SMA	
	APM (%)	APK (%)	APM (%)	APK (%)	APM (%)	APK (%)
2014	91,3	111,0	79,4	101,6	55,3	79,2
2019	94,8	114,1	82,0	106,9	67,5	91,6

❑ Jumlah anak tidak sekolah umur 7-15 mengalami penurunan (2009-2012):
2,52 juta atau 6% populasi (2009) → 1,99 juta atau 4,6% populasi (2012)

❑ Gender disparity tidak menjadi isu dan telah mengalami penurunan:
SD: 2,30% vs 1,80% (2009) dan 2,25% vs 1,83% (2012)
SMP: 15,7% vs 13,4% (2009) dan 11,44% vs 9,17% (2012)

❑ TETAPI anak putus sekolah tingkat SMP dan SMA masih tinggi:
7-12 tahun: 2% dari populasi dan 13-15 tahun: 10,3% dari populasi

Sumber: Unicef – Kemendikbud, 2015 dan Susenas 2013

Sumber: Kemendikbud, 2017

Salah satu faktor penyebab angka putus sekolah adalah faktor ekonomi sehingga tidak mampu membayar biaya pendidikan karena tingginya biaya pendidikan baik biaya operasional maupun biaya personal yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya operasional antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya personal antara lain meliputi biaya transportasi, kursus, seragam, uang saku dan biaya lain-lain. Biaya operasional saat ini sudah banyak ditanggung oleh pemerintah, sementara biaya personal yang umumnya lebih tinggi ditanggung oleh orang tua siswa.

Hasil Susenas 2013 tentang estimasi biaya personal per tahun untuk pendidikan dasar dan menengah setiap tahun yang harus ditanggung oleh orang tua siswa jenjang SD, sebesar Rp 910.000, SMP Rp1. 390.000 dan SMA sederajat Rp 1.660.000, sementara dana bantuan personal dari pemerintah rata-rata pertahun hanya dapat menutupi 50% dari seluruh biaya personal (tabel 2).

Tabel 1.2 Estimasi Biaya Pendidikan Per Tahun

ESTIMASI BIAYA PENDIDIKAN PER ANAK PER TAHUN				
Jumlah bantuan tunai yang diterima hanya dapat menutupi kurang dari separuh Biaya Personal yang harus dikeluarkan oleh keluarga per tahun				
Jenjang Pendidikan	Biaya Operasional Pendidikan (Rp)	Biaya Personal Pendidikan (Rp)	Total Biaya Pendidikan (per anak per tahun dalam Rp)	Bantuan PIP per tahun (Rp)
SD Sederajat	210,000	910,000	1.120.000	450.000
SMP Sederajat	390,000	1,390,000	1.780.000	750.000
SMA Sederajat	940,000	1,660,000	2.600.000	1.000.000

Sumber: Susenas 2013 dan Kemendikbud-Kemenag

Meskipun PIP belum dapat menutupi seluruh biaya personal pada pendidikan dasar dan menengah, program PIP telah

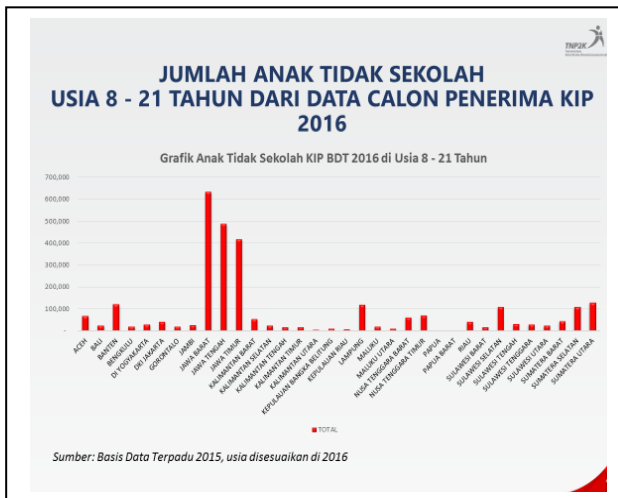
banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik pada pendidikan formal maupun non formal, karena siswa dapat terus mendapatkan layanan Pendidikan, sehingga PIP diharapkan mampu menekan angka putus sekolah. Perkembangan angka putus sekolah (APS) pada pendidikan menengah dalam lima tahun terakhir cenderung terjadi penurunan, terutama untuk jenjang SD dan SMP (tabel 1.3). APS SD dan SMP pada tahun 2015 yakni 0,67% dan 0,87%, merupakan penurunan yang cukup signifikan dari APS pada tahun sebelumnya (2014) yakni SD sebesar 1,10% dan SMP 1,42%. Sementara perkembangan APS pada pendidikan menengah di SMK juga terjadi penurunan tahun 2014 sebesar 3,89% dan tahun 2015 2,05%. Namun untuk SMA cenderung belum terjadi penurunan (PDSP, 2015). Oleh sebab itu, terlaksananya Program Indonesia Pintar diharapkan dapat menurunkan tingginya angka tidak melanjutkan dan tingginya angka putus sekolah (*drop-out*), sehingga dapat meningkatkan APK. Dengan demikian Program Indonesia Pintar bagi siswa miskin terus semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah penerima maupun besaran dana per siswa.

Tabel 1.3 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2010/2011 - 2014/2015

No	Tingkatan dan Jenis Sekolah	09/10--10/11		10/11--11/12		11/12--12/13		12/13--13/14		13/14--14/15	
		Jumlah / No.	%	Jumlah / No.	%	Jumlah / No.	%	Jumlah / No.	%	Jumlah / No.	%
1	SD/MI	439.033	1,6	248.988	0,90	352.673	1,28	294.045	1,10	176.909	0,67
2	SMP	166.328	1,8	146.871	1,57	134.824	1,43	137.436	1,42	85.000	0,87
3	SMA	139.998	3,5	47.709	1,16	42.471	1,01	42.008	0,98	68.219	1,59
4	SMK	98.640	2,9	124.792	3,34	124.791	3,10	129.037	3,08	86.282	2,05

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud (2015)

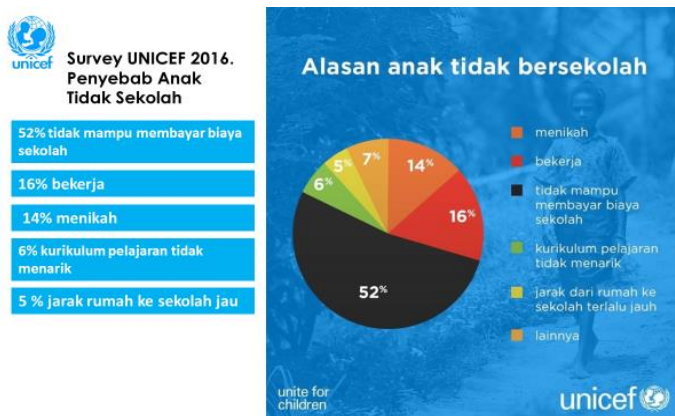
Disadari bahwa PIP meski telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun ternyata belum semua anak mendapatkan manfaat KIP, sehingga perlu mendapat perhatian khususnya anak usia sekolah yang tidak sekolah yaitu usia 8-21 tahun yang jumlahnya masih cukup banyak yang tersebar di berbagai lokasi studi dan perlu mendapatkan layanan pendidikan (grafik 1.4).



Grafik 1.4 Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah 8-21 tahun Tahun 2016

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang ada di surat kabar Kompas yaitu masih terdapat 2,9 juta anak usia 6-21 tahun belum terjangkau KIP (Kompas, 8 Mei 2017). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2014, menyebutkan lebih dari 4,7 juta anak Indonesia usia antara 7-18 tahun tidak bersekolah, salah satu penyebab utamanya adalah alasan ekonomi (Tim Viva, 2017). Sementara Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni dengan rincian sebanyak 600 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia sekolah di jenjang

Pendidikan Menengah Pertama (CNN Indonesia, 2017). Hasil dari survey UNICEF 2016 menyebutkan bahwa penyebab dari tidak sekolahnya anak tersebut diantaranya adalah 52% tidak mampu membayar biaya sekolah, 16% bekerja, 14% menikah, 6% kurikulum pelajaran tidak menarik, dan 5% jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh.



Gambar 1.1 Data Penyebab ATS hasil survey UNICEF

Hasil analisis Pusat Data dan Informasi Pendidikan (PDSP) tahun 2016 (lihat tabel 1.3) yang dihitung berdasarkan perhitungan data Susenas tahun 2015 menyebutkan bahwa angka putus sekolah anak usia 7-18 tahun sebanyak 64.265 siswa yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Dari jumlah kelompok usia tersebut angka putus sekolah terbesar adalah pada anak usia 7-12 yaitu sebesar 34.404. sedangkan anak usia 13-15 tahun sebesar 16.460, dan usia 16-18 tahun sebanyak 13.401 anak. Penyebab dari anak putus sekolah dan anak tidak sekolah terdapat beberapa faktor, antara lain; tidak ada biaya, bekerja mencari nafkah, mengurus rumah, tanpa alasan, dan lain-lain.

Faktor penyebab tersebut yang paling besar adalah tidak menyebutkan penyebabnya atau tanpa alasan lebih dari 90%. Sedangkan yang menyatakan tidak ada biaya hanya sekitar 2% dan yang menyatakan mencari nafkah dibawah 2%. Banyaknya responden yang tidak memberikan alasan atau penyebab putus sekolah umumnya diduga karena kemampuan akademis yang rendah sehingga malu untuk menyebutkannya.

Tabel 1. 4 Persentase anak putus sekolah berumur 7-18 tahun yang tidak/belum sekolah atau tidak bersekolah lagi berdasarkan alasan utama tidak bersekolah

Alasan Utama Tidak Bersekolah	7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Tidak ada alasan	31.767	92,34	15.147	92,02	12.337	92,06
Tidak ada biaya sekolah	671	1,95	352	2,14	268	2,00
Bekerja/mencari nafkah	632	1,84	327	1,99	263	1,96
Menikah	319	0,93	142	0,86	118	0,88
Mengurus rumah tangga	176	0,51	85	0,52	79	0,59
Merasa pendidikan cukup	293	0,85	143	0,87	90	0,67
Malu karena ekonomi	30	0,09	10	0,06	15	0,11
Sekolah jauh	60	0,17	27	0,16	32	0,24
Cacat/disabilitas	48	0,14	19	0,12	22	0,16
Lainnya	408	1,19	208	1,26	177	1,32
Jumlah	34.404	100,00	16.460	100,00	13.401	100,00

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

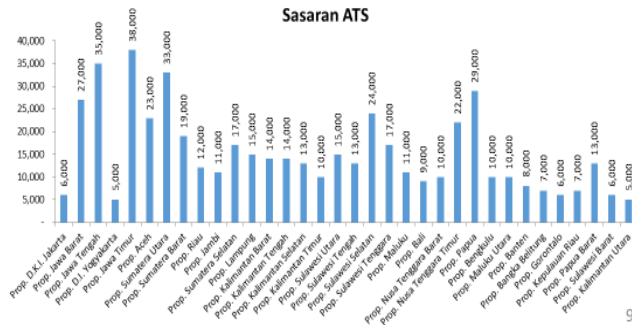
Faktor penyebab putus sekolah Kementerian PPPA mencatat, selain faktor tidak ada biaya terdapat tujuh alasan lain yang mengakibatkan anak mengalami putus sekolah. Pertama, bekerja/mencari nafkah sebesar 15,06 persen. Kedua, menikah/mengurus rumah tangga 7,52 persen. Ketiga, merasa pendidikan cukup sebesar 4,90 persen. Keempat, malu karena ekonomi sebesar 2,11 persen. Kelima, sekolah jauh 3,10 persen. Keenam, cacat/difabilitas 4,56 persen. Dan ketujuh, karena faktor lainnya sebesar 26,84 persen. Sebanyak 35,90 persen anak yang berada di perkotaan dan perdesaan berumur

7-17 tahun yang tidak/belum pernah sekolah/tidak bersekolah lagi dikarenakan tidak ada biaya, atau menjadi persentase tertinggi dari berbagai alasan lainnya. "Dari beberapa alasan yang disampaikan, tidak ada biaya menjadi penyebab paling dominan bagi anak usia 7-17 tahun untuk tidak sekolah atau belum pernah sekolah atau juga tidak bersekolah lagi" (Tarmizi, 2016).

Terkait dengan permasalahan-permasalahan tentang banyaknya anak putus sekolah usia 6—18 tahun dari berbagai sumber sebagaimana disebutkan di atas, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melaksanakan *Fokus Group Discussion* (FGD) dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan diperoleh informasi bahwa jumlah anak yang tidak sekolah jumlahnya masih cukup besar sekitar 4,1 juta anak, dan setelah dilakukan pencarian/pendataan ke pelosok-pelosok berhasil didata dan diinput ke Dapodikmas sebanyak 648 ribu anak, tetapi yang memiliki KIP hanya sebanyak 211 ribu orang. Dengan demikian masih banyak anak yang belum mendapat layanan Pendidikan melalui KIP. Dalam lampiran Juknis pendataan ATS disebutkan jumlah sasaran penjangkaran ATS ada 514.000 (lihat grafik 1.4).

SASARAN PENJARINGAN ATS PER PROVINSI

DALAM JUKNIS PENDATAAN ATS 2017, OLEH DITJEND PAUD DAN DIKMAS MENYEBUTKAN BAHWA JUMLAH SASARAN ATS SELURUNYA ADALAH **514.000** ATS



Grafik 1.5 Sasaran ATS per provinsi
(Juknis Pendataan, Kemendikbud 2017)

Fenomena Anak Tidak Sekolah masih belum tereksplorasi dengan baik, padahal jumlah anak tidak sekolah masih cukup besar. Saat ini, kebanyakan program pendidikan masih terfokus kepada anak yang masih berada di dalam lembaga pendidikan (*preventif*) sehingga perlu adanya kebijakan dan program yang juga dapat menjangkau anak tidak sekolah. Pemerintah melalui berbagai program berkomitmen untuk menjangkau anak tidak sekolah beberapa diantaranya melalui Program Indonesia Pintar. Berkaitan dengan hal tersebut Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengkaji permasalahan anak tidak sekolah yang belum tereksplorasi dan apa faktor-faktor penyebab, serta bagaimana strateginya agar anak putus sekolah dapat sekolah kembali.

B. Pertanyaan Kebijakan

Sasaran KIP ada dua yaitu 1) untuk anak yang ada di sekolah dan 2) untuk anak yang ada di luar sekolah. Anak yang tidak sekolah itu jumlahnya cukup besar sekitar 4,1 juta anak, namun setelah dilakukan pencarian ke daerah-daerah pelosok berhasil di data dan dimasukkan ke data Dapodikmas sebanyak 648 ribu, tetapi yang punya KIP hanya berjumlah 211 ribu orang saja. Permasalahan utamanya adalah bagaimana agar dapat mengajak mereka untuk kembali ke sekolah, sehingga hal inilah yang dianggap paling *urgent*. Sedangkan untuk masalah pencairan dana KIP, mungkin dapat dikatakan lebih mudah, dan fakta yang ada saat ini dan dirasa sangat sulit adalah untuk menemukan di mana anak yang tidak sekolah tersebut berada. Oleh karena itu permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian kita. Masih ada sekitar 3 jutaan anak yang masih belum bisa dipetakan keberadaannya agar mereka bisa kembali ke sekolah formal atau ke non formal. Terdapat sebanyak 2,9 juta yang belum mendapatkan manfaat dari KIP. Sebagian besar KIP tidak sampai kepada mereka karena tidak jelas keberadaannya selain itu ada data yang sudah berubah seperti anaknya mendapat KIP sudah kuliah atau bahkan ada yang sudah menikah. Kajian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian dimana keberadaan mereka sehingga bisa kembali ke sekolah baik itu formal maupun non formal. Bagaimana strateginya yang efektif untuk melakukan pendataan ATS tersebut? Apa yang menjadi faktor penyebab ATS dan apa yang menyebabkan ATS mau kembali ke sekolah? Upaya dan Motivasi apa yang dilakukan agar anak tidak sekolah (ATS) kembali sekolah.

C. Tujuan Penelitian

Memperoleh bahan rekomendasi kebijakan mengenai strategi penjangkauan anak tidak sekolah (ATS) untuk mengikuti

pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dengan fokus analisis sbb:

1. Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS).
2. Faktor penyebab ATS dan kembali ke sekolah
3. Upaya dan Motivasi anak tidak sekolah (ATS) kembali sekolah

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan tentang strategi penjangkauan ATS yang efektif agar dapat mengikuti pendidikan. Fokus kajian pada data ATS penerima KIP dan bukan penerima, faktor penyebab ATS, dan strategi mendorong anak putus sekolah/tidak sekolah agar bersedia untuk bersekolah kembali, sebagai upaya mendukung percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas.

E. Limitasi

Penelitian ini dilakukan pada satuan pendidikan non formal. ATS tersebut mencakup anak yang tidak pernah bersekolah dan anak yang putus sekolah/tidak lagi bersekolah baik antar kelas maupun antar jenjang pendidikan (dari SD ke SMP; dari SMP ke SMA/SMK). Batasan usia target utama penjangkauan anak tidak sekolah adalah usia 6 – 21 tahun

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II akan membahas tentang kajian literatur yang terkait dengan pelaksanaan PIP pada pendidikan non-formal sebagaimana telah dirumuskan pada tujuan penelitian, yaitu pada anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) meliputi: (i) Kebijakan Program Indonesia Pintar (ii) Pendanaan pendidikan (iii) Anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS), (iv) dan Hasil Penelitian terkait.

A. Kebijakan Program Indonesia Pintar

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) mulai dilaksanakan tahun 2015 berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015, yang diundangkan tanggal 12 Mei 2015. PIP diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Program Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah dalam bentuk pendanaan pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa. Mereka yang menerima adalah siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. KIP merupakan bentuk dukungan terhadap program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikas) 9 Tahun dan kemudian akan dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun, yang mengharuskan pemerintah hadir dalam pembiayaan. Hal ini penting untuk

dilakukan, dan sejalan dengan tujuan PIP yang menyebutkan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan juga untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

Realitas stratifikasi sosial berdasarkan status sosial ekonomi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa banyaknya orang tua siswa usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak dapat membiayai pendidikan anak. Di lain pihak, dengan diselenggarakannya kedua program tersebut pendidikan tidak saja wajib, tetapi menjadi hak bagi setiap anak usia pendidikan dasar dan menengah tanpa diskriminasi berdasarkan pada suku bangsa, agama, maupun stratifikasi sosial.

Pendanaan pendidikan pada tingkat siswa bukan merupakan program yang bersifat eksklusif untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan siswa, tetapi ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan siswa sampai selesai jenjang pendidikan menengah baik satuan pendidikan negeri maupun swasta. Namun demikian meskipun pemerintah juga telah menyelenggarakan program pendanaan dengan satuan pendidikan sebagai basis, yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), skema pendanaan ini belum dapat menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomis sampai selesai. Skema pendanaan yang ditujukan pada satuan pendidikan ditujukan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan serta biaya manajemen yang menyertainya.

PIP merupakan skema pendanaan yang secara langsung memberikan dukungan dana tidak langsung bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Program

tersebut bersifat *complementary* terhadap program yang dialokasikan untuk satuan pendidikan.

1. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sebagaimana tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2014 merupakan pemberian bantuan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah.

Kuota Program Indonesia Pintar tahun 2017 sebanyak 17.927.308 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak-anak, anak yang berada di panti asuhan dan anak *disable*. KIP berlaku juga kepada anak yang berada di pondok pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan anak yang berada di Balai Latihan Kerja (BLK). Berikut penjelasan lebih rinci terkait kriteria sasaran penerima KIP.

a. Prioritas Sasaran Penerima

Sasaran PIP adalah Peserta Didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:

- 1) Peserta didik pemilik KIP;

- 2) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus; a) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); b) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); c) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; d) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam; e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orangtua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah; f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; g) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

b. Persyaratan Penerima

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Peserta didik Pendidikan Formal: (a) terdaftar sebagai peserta didik di sekolah; (b) terdaftar dalam Dapodik sekolah.
- 2) Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
 - a) terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - b) terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal.

2. Mekanisme Pengusulan

Usulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Siswa/anak dari keluarga pemilik KPS/KKS/ KIP

- 1) Untuk siswa sekolah formal, sekolah mengentri/meng-up-date data siswa (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP yang memiliki KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan direktorat teknis;
- 2) Anak didik yang belajar di pendidikan non-formal, SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan menyampaikan usulan calon penerima PIP sesuai dengan Format Usulan Lembaga ke dinas pendidikan kabupaten/ kota;
- 3) Dinas pendidikan kabupaten/kota menyampaikan/ meneruskan usulan calon penerima dari sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan yang telah disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota tersebut sebagai usulan ke direktorat teknis;
- 4) anak yang tidak bersekolah dan tidak juga belajar di pendidikan non formal manapun, dapat diusulkan dengan syarat mendaftarkan diri ke sekolah formal atau pendidikan non formal dengan menunjukkan KPS/KKS/KIP.

b. Siswa/Anak yang tidak memiliki KPS/KKS/ KIP

Baik siswa sekolah formal maupun anak didik dari lembaga pendidikan non formal (SKB/PKBM/ lembaga

kursus dan pelatihan) dari keluarga miskin/rentan miskin yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP, seluruhnya dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga pendidikan non formal setelah seluruh siswa/anak dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima PIP pada tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan mekanisme sebagai berikut;

- 1) Sekolah/lembaga pendidikan non formal (SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan) menseleksi dan menyusun daftar siswa/anak didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana PIP berdasarkan alokasi sementara sasaran per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktorat teknis dengan prioritas sebagai berikut:
 - a) Siswa/anak yang berasal dari rumah tangga terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
 - c) Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;
 - d) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah;
 - e) Siswa/anak miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah;
 - f) Siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, siswa dari orang tua terkena PHK, siswa di daerah konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dan

siswa memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah;

- g) Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman;
- 2) Sekolah mengusulkan siswa hasil seleksi sebagai penerima PIP melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman: pip.kemdikbud.go.id ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Sedangkan lembaga pendidikan non formal (SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan) dapat mengusulkan sesuai Format Usulan Lembaga ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
 - 3) Dinas pendidikan kabupaten/kota menyampaikan/meneruskan usulan siswa (baik siswa sekolah formal maupun anak didik dari lembaga pendidikan non formal) calon penerima dari sekolah dan disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagai usulan ke direktorat teknis.

c. Siswa yang diusulkan oleh pemangku kepentingan

Siswa calon penerima PIP dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data usulan terhadap Dapodik. Seluruh pengusulan dari sekolah dapat dilakukan melalui VIP/Dapodik. Diagram dapat dilihat pada gambar 2.2.

3. Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima dana PIP dalam Juknis PIP 2017 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut; (a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan; (b) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan provinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; (c) Siswa SMK penerima PIP yang menempuh studi keahlian kelompok (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman yang ada dalam aplikasi Dapodik dapat langsung ditetapkan sebagai penerima PIP sepanjang alokasi terpenuhi; (d) untuk peserta Kejar Paket A/B/C, penetapan penerima BSM/PIP dilakukan oleh Direktorat PSD, PSMP, PSMA setelah menerima surat keputusan penetapan penerima BSM/PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud; (e) untuk peserta kursus/pelatihan penetapan penerima PIP dilakukan oleh direktorat teknis terkait setelah menerima surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemdikbud.

4. Pemanfaatan Dana PIP

Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut: (a) membeli buku dan alat tulis; (b) membeli pakaian seragam

sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); (c) membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; (d) uang saku peserta didik; (e) biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; (f) biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal. Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Pemanfaatan dana PIP tersebut di atas termasuk untuk penerima uji coba pelaksanaan KIP Plus di beberapa daerah tertentu.

B. Pembiayaan Pendidikan

Pemerataan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi; “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Hal ini juga tercantum dalam BAB IV Pasal 5 Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang berbunyi;”

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Oleh karena itu undang-undang mengamanatkan agar pemerintah memperhatikan anak-anak usia sekolah agar dapat mengikuti pendidikan dasar tanpa dibebani biaya yang dapat menghambat proses pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”.

Kalau kita kaji isi dari pasal tersebut banyak makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya: (1) Dana untuk pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah; (2) Anak usia sekolah yaitu usia tujuh sampai lima belas tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa dikenakan biaya; (3) Anak yang berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya ini tidak memandang dari golongan miskin atau kaya. Mereka semua merupakan tanggung jawab pemerintah. Dasar kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Amanat UUD 1945 pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
2. Pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”
3. Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”

Berdasarkan undang-undang tersebut seharusnya pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakannya. Karena selain tuntutan dari undang-undang, pendidikan juga dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemahaman Wajib belajar di Indonesia tidak sama dengan wajib belajar (*compulsory education*) seperti yang dipersepsi oleh negara-negara maju, yang secara ekonomis telah lebih makmur. Dalam pengertian negara maju, *compulsory education* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tiadanya orangtua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Adapun ciri-ciri wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia ialah: (1) tidak bersifat paksaan, melainkan himbauan; (2) tidak ada sanksi hukum, dan yang lebih menonjol adalah aspek moral, yakni orangtua dan peserta didik merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan dasar karena berbagai kemudahan telah disediakan; (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri; dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi dalam pendidikan.

Untuk jenjang pendidikan dasar, pandangan yang paling dominan di banyak negara sejak tahun 1940-an adalah bahwa pendidikan dasar harus bebas biaya (Bray, 2002). Dengan kata lain, pemerintah harus membiayai sepenuhnya pendidikan tingkat dasar. Pandangan ini antara lain terlihat dari *Artikel 26 United Nation Declaration of Human Rights* yang menyatakan: “*Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.*”

Menurut Woodhall dalam Psacharopoulos (1985), *cost-effectiveness analysis* adalah suatu teknik untuk mengukur hubungan antara total input atau biaya-biaya dari suatu proyek atau kegiatan dengan output atau hasil yang diperoleh. *Cost* dan *effectiveness*, keduanya harus diukur secara kuantitatif, namun tidak perlu dihitung dalam satuan uang (*monetary terms*). Oleh karena itu, analisis *cost-effectiveness* perlu dibedakan dengan analisis *cost-benefit* yang mengukur biaya dan manfaat suatu

proyek dalam satuan uang (*monetary terms*) untuk mengetahui tingkat balikan (*rate of return*).

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 secara eksplisit mewajibkan pemerintah untuk memberikan beasiswa yang dapat menjamin kesempatan yang sama bagi semua anak (serta bagi semua warga negara) dalam memperoleh Pendidikan Dasar. Sebuah program baru bantuan sekolah di tahun 2005 - Bantuan Operasi Sekolah (BOS) – diperkenalkan sebagai bentuk dukungan pendidikan secara langsung kepada rumah tangga agar dapat terus mengirimkan anak mereka bersekolah tanpa harus membayar biaya sekolah seperti biaya SPP. Kemudian pada tahun 2008, Program Bantuan Siswa Miskin/BSM juga diperkenalkan dengan tujuan agar dapat membantu siswa miskin dalam mengatasi permasalahan tingginya biaya pendidikan lainnya. Sebelumnya program ini dikenal dengan Program Beasiswa.

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 16 IPB/2012 mengatur mengenai pencairan dan penyaluran dana BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi yang bersumber dari APBN kepada penerima dana termasuk pertanggungjawabannya.

Program BSM dibiayai dari dana APBN dan pada 2010 menghabiskan 11persen dari total pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial bagi rumah tangga dan 3 persen anggaran pendidikan, duapertiganya dari Kemdikbud dan sepertiganya dari Kemenag. Total anggaran BSM 2010 untuk seluruh satuan jenjang pendidikan sebesar Rp. 2,9 triliun. Sementara pada tahun 2009 Rp2,6 triliun dan 2008 Rp1,2 triliun, duapertiganya untuk SD dan SMP dan sepertiganya untuk SMA dan Universitas. Proporsi anggaran BSM untuk pendidikan dasar SD dan SMP pada 2010 untuk 2.5 juta siswa dan Rp1 triliun sekitar 43 persen dari total anggaran untuk seluruh jenjang pendidikan. Sementara itu untuk 1.2 juta siswa MI dan MTS

dengan Rp 619 milyar sekitar 27 persen, 310.000 siswa MA dengan Rp 243 milyar sekitar 11 persen .

Pada tahun 2011, anggaran untuk BSM SD sebesar Rp762.228.000.000 yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi, untuk SMA sebesar Rp 243.244.961.000 untuk 308.124 siswa melalui dana dekonsentrasi. Saat ini, kecuali jenjang SMP, sekolah bertanggung jawab dalam memilih dan mengusulkan siswa yang akan menerima manfaat dari program BSM (berdasarkan kuota yang diputuskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota). Sampai tahun 2012, pemerintah daerah (dalam hal ini terutama kantor dinas pendidikan kabupaten/kota) memiliki tanggung jawab dalam memutuskan jumlah kuota penerima BSM di masing – masing sekolah serta di dalam memastikan tersalurkannya dana BSM kepada anak – anak penerima BSM ditingkat sekolah.

Menurut Beeby (1975) penyebab utama anak Indonesia tidak bersekolah adalah masalah pembiayaan. Sementara, menurut data Balitbang Kemdikbud (2010) penyebab anak Indonesia tidak bersekolah berkaitan dengan analisis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan menengah, biaya yang dikeluarkan meliputi: (1) buku dan alat tulis; (2) pakaian dan perlengkapan sekolah; (3) akomodasi; (4) transportasi; (5) konsumsi; (6) kesehatan; (7) karyawisata; (8) uang saku; (9) kursus; (10) iuran sekolah; (11) *Foregone earning*

Semua biaya tersebut tidak bisa dibebankan pada orangtua, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Keadaan ini tampak sekali masih banyak anak yang putus sekolah, pengangguran dan sebagainya karena hanya alasan tanpa biaya. Biaya merupakan faktor penting dalam pendidikan. Namun memenuhi hajat hidup dalam hal ini kebutuhan pokok lebih penting. Hal ini yang menyebabkan banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya. Banyak sekali anak usia sekolah yang harus membantu orangtuanya mencari nafkah.

C. Konsep Kemiskinan

Konsep kemiskinan dalam dimensi pendapatan dapat dikaitkan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan seseorang. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Kebutuhan pokok tersebut mencakup kebutuhan sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Jika pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Menurut BPS (1994) mendasarkan kebutuhan dasar pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan dalam menentukan kemiskinan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, kebutuhan non pangan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak tahun 1976. Sedang kemiskinan anak adalah kemiskinan yang dialami selama masa anak-anak dan remaja. Berbeda dari kemiskinan dewasa, kemiskinan anak memiliki penyebab dan efek yang berbeda, dan dampak kemiskinan selama masa kanak-kanak memiliki efek permanen pada anak-anak (Minujin, 2005).

Bappenas (2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Widiastuti, 2010). Konsep kemiskinan menurut Bellinger (2007) memiliki dua dimensi yaitu dimensi pendapatan dan dimensi non pendapatan. Kemiskinan dalam dimensi pendapatan didefinisikan sebagai seseorang atau rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah, diukur dari hal kepemilikan harta kekayaan seperti lahan dan kesulitan dalam mengakses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi non

pendapatan ditandai dengan adanya ketidakmampuan, ketiadaan harapan, tidak adanya kebebasan yang dapat juga menimpa pada berbagai level pendapatan. Kemiskinan dari sisi pendapatan lebih sering didiskusikan karena lebih mudah diukur dan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

Kriteria kemiskinan rumah tangga antara lain luas lantai bangunan kurang dari 8 m², jenis lantai bangunan tempat tinggal berupa tanah/bambu, sumber penerangan bukan listrik, pendidikan kepala rumah tangga meliputi tidak sekolah/tidak tamat SD, jenis dinding bangunan tempat tinggal berupa bambu/rumbia kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester, fasilitas tempat buang air besar, meliputi tidak punya/bersama rumah tangga lain, sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari terbuat dari kayu bakar/arang/minyak tanah, frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga meliputi satu kali/dua kali makan sehari, ketidakmampuan membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik (BPS, 2005).

D. Sekolah Pendidikan Nonformal dan Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah (ATS)

1. Sekolah Pendidikan NonFormal (SPNF)

Pada dasarnya, penyebutan pendidikan formal dan pendidikan non-formal hanya untuk menunjukkan perbedaan penekanan dalam pelaksanaannya. Pendidikan Formal lebih menitikberatkan pada pendidikan di sekolah, sedang Pendidikan Non-Formal lebih menekankan pada proses pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (USPN No. 20 Th 2003). Pendidikan nonformal juga dapat diartikan setiap kegiatan

terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal juga dapat didefinisikan salah satu bentuk layanan pendidikan yang bertujuan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Adapun jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Dengan bermunculannya pendidikan nonformal di masyarakat diharapkan anak akan mendapatkan nilai dan ilmu lebih dari yang dapatkan di sekolah dan lingkungan keluarga. Sesungguhnya pendidikan nonformal adalah pendukung dari pendidikan formal yang anak didapatkan di sekolah baik negeri maupun swasta. Pendidikan nonformal juga merupakan pendukung dari pendidikan informal yang didapatkan dari lingkungan keluarga, meliputi pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral dan sosialisasi yang diperkenalkan oleh orang tua. Namun, ada juga orang tua yang lupa pada peran pentingnya untuk mengutamakan pendidikan informal. Mereka cenderung memberikan tugas dalam pendidikan informal kepada para pendidik di pendidikan nonformal, karena pendidikan dimulai dari keluarga, yang akan

menciptakan kepribadian anak nantinya. Anak-anak yang tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan formal sepatutnya sebanyak mungkin dijangkau melalui PNFI agar mereka mendapat pembekalan yang memadai untuk kehidupannya. PNFI dapat menjawab kebutuhan 11 pendidikan yang disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat setempat yang tidak dapat dijawab oleh pendidikan formal. (Depdiknas: 2009).

Rasio Daya Tampung Sekolah nonformal terhadap Siswa

Secara umum penetapan daya tampung dimaksudkan untuk mengetahui banyak murid yang akan diterima sesuai dengan kemampuan sekolah. Penetapan daya tampung dilakukan dengan antara lain mempertimbangkan jumlah ruangan/kelas, meja dan kursi yang tersedia serta murid yang tinggal di kelas. Secara sederhana dan lebih konkret, penetapan daya tampung itu dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut.

- a. DYT = daya tampung
- b. JM = jumlah meja
- c. JK = jumlah kelas
- d. MTK = murid tinggal kelas
- e. JL = jumlah lokal/ ruangan kelas

Dari perhitungan di atas, didapatkan jumlah daya tampung maksimal suatu sekolah dalam menerima murid baru. Namun demikian kadang-kadang jumlah penerimaan murid baru ini (terutama jumlah maksimal yang boleh diterima) sudah ditentukan, sehingga sekolah tinggal melaksanakan ketentuan itu. Seringkali penetapan daya tampung ini tidak perlu dilakukan. Hal ini terjadi karena daya tampung yang tersedia tidak terisi akibat berbagai faktor, seperti suksesnya program keluarga berencana, atau karena sekolah terpencil jumlah murid yang mendaftar

sangat sedikit. Di samping itu tidak sedikit sekolah dasar yang pada waktu sekarang sudah mempunyai lokal yang berlebih dibandingkan dengan jumlah calon murid yang mendaftar.

Terkait dengan Pendidikan Non-Formal dapat mengikutsertakan lembaga-lembaga swasta dan lembaga-lembaga pemakai tenaga kerja para lulusannya. Rasio siswa terhadap lembaga pendidikan nonformal adalah perbandingan antara jumlah siswa nonformal/ sederajat dengan jumlah lembaga nonformal/ sederajat per kabupaten/kota di seluruh Indonesia tahun 2016/2017. Variabel tersebut merupakan indikator yang dapat menggambarkan rata-rata daya tampung lembaga pendidikan nonformal terhadap jumlah siswa. Dengan demikian akan terlihat bahwa semakin besar rasio siswa terhadap lembaga pendidikan nonformal akan memberikan gambaran bahwa daya tampung siswa setiap lembaga pendidikan nonformal juga akan semakin besar.

2. Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS)

Anak usia sekolah yang tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia 6-12 tahun yang tidak sekolah karena suatu hal, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak (Wong (2009). Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Menurut Gaudin (1993) dan Sullivan (2000), salah satu bentuk penelantaran anak adalah penelantaran pendidikan dengan tidak menyekolahkan anak, membiarkan anak tidak sekolah selama lebih dari 5 bulan, tidak memberikan pendidikan istimewa kepada anak yang berkebutuhan khusus.

Menurut Dubowitz (2007) terdapat 6 tipe penelantaran pada anak, salah satunya adalah penelantaran pendidikan, mencakup gagalnya pengasuh untuk memberikan lingkungan yang baik untuk perkembangan intelektual anak, tidak peduli dengan pendidikan anak, tidak memberikan pendidikan yang layak sesuai umurnya dan tidak memberikan pendidikan tertentu untuk anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga dapat mendefinisikan anak tidak sekolah sebagai anak usia 6-21 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, sosial budaya, ekonomi maupun akses sehingga menjadi penghalang anak untuk bersekolah, putus sekolah maupun untuk kembali bersekolah, baik disebabkan oleh faktor individu, keluarga dan faktor lingkungan sekitar. Secara umum cakupan untuk mendapatkan ATS adalah jumlah anak usia sekolah 6-21 tahun di seluruh Indonesia – siswa madrasah yang dikelola oleh kemenag – siswa pendidikan formal dan nonformal yang dikelola kemendikbud.

a. Faktor-faktor yang memengaruhi ATS

1) Faktor Individu

Faktor individu yang digunakan dalam penelitian ini merupakan karakteristik dari anak, baik karakteristik biologis maupun demografinya. Variabel Individu diantaranya jenis kelamin anak, daerah tempat tinggal, status disabilitas, salah satu atau kedua orangtua kandung sudah meninggal dan memiliki saudara atau anak lain yang tidak sekolah di dalam rumah tangga.

a) Jenis kelamin

Maranoor dan Somashekharappa (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar, anak perempuan cenderung untuk mengalami putus sekolah. Mengingat pengembangan sumberdaya perempuan di Indonesia masih tergolong rendah (Ulfatin 2003). Menurut Sudarwati (2009), pilihan anak laki-laki yang bersekolah atau anak perempuan yang bersekolah dipengaruhi oleh cara pandang orangtua tentang nilai anak.

b) Menurut Daerah tempat tinggal

Fahmi dan Marizka (2014) menyatakan peluang anak-anak yang tinggal di pedesaan, yang lebih besar menjadi *Out-Of-School Children* (OOSC) dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan.

c) Salah satu atau kedua orangtua meninggal dunia

Menurut Sidebotham (2004) menunjukkan bahwa anak yang memiliki keluarga mengalami penyusunan ulang keluarga intinya berpeluang sekitar 1.75 sampai 3.81 kali mengalami penelantaran dibandingkan anak yang lain. Apabila salah satu/kedua orangtuanya meninggal biasanya akan mengalami penyusunan ulang keluarga intinya.

d) Memiliki saudara atau anak lain yang tidak sekolah di dalam rumah tangga.

Anak yang memiliki saudara kandung atau anak lain yang terlantar dalam keluarganya, berisiko tinggi untuk terlantar. Hal ini disebabkan seorang individu cenderung memiliki karakteristik yang serupa apabila tinggal di lingkungan sosial yang sama. Dalam hal ini merupakan rumah tangga yang sama, orangtua anak hampir pasti akan melakukan hal yang tidak bertolak belakang pada anaknya, begitu pula apabila kemiskinan melanda salah satunya hampir pasti saudara yang lainnya merasakan imbasnya sehingga sangat memungkinkan anak dalam rumah tangga yang memiliki saudara tidak sekolah akan berisiko tinggi untuk menjadi anak tidak sekolah juga.

e) **Anak Mengalami Disabilitas**

Anak yang memiliki disabilitas fisik, kognitif dan emosional memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tidak bersekolah, khususnya pada anak laki-laki (Trocme, dkk., 1999). Anak yang mengalami disabilitas umumnya membutuhkan perhatian lebih dari orangtua dibandingkan anak normal lainnya, hal ini juga terkadang membuat orang tua merasa tertekan. Selain itu mereka tidak mengerti atas konsekuensi perilaku mereka dan bahkan tidak dapat membela dan melindungi dirinya sendiri.

2) Faktor Rumah Tangga

Faktor rumah tangga yang mempengaruhi anak tidak sekolah dilihat dari karakteristik sosial-demografi dan ekonomi yang terlihat dari

karakteristik kepala rumah tangga, seluruh anggota rumah tangga dan lingkungan hidup rumah tangganya. Faktor rumah tangga yang digunakan dalam penelitian diuraikan di bawah ini.

a) Jumlah orang dewasa

Jumlah orang dewasa dalam rumah tangga berhubungan dengan kejadian anak tidak sekolah dalam rumah tangga tersebut. Masa kanak-kanak merupakan masa dimana manusia masih rentan dan membutuhkan pengawasan lebih bagi mereka, karena mereka masih dalam tahap perkembangan awal. Semakin banyak anggota rumah tangga yang sudah dewasa semakin besar pula pengawasan terhadap anak, sehingga kebutuhan mereka lebih tercukupi (Cornell-Carrick dan Scannapieco, 2006).

b) Rumah tidak layak huni

Menurut Connel-Carrick dan Scannapieco (2006) sekitar 81% anak dengan rumah yang kumuh dan tidak bersih mengalami kekerasan maupun penelantaran. Rumah yang tidak layak huni juga merupakan salah satu indikator kemiskinan suatu rumah tangga. Anak yang tumbuh dalam keadaan miskin lebih rentan terhadap kekerasan (Sidebotham dan Heron, 2006).

c) Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga (KRT)

Orang tua yang memiliki pendidikan rendah biasanya tidak mengerti dengan perkembangan kognitif dari anak pada umur

tertentu, mereka akan memiliki harapan yang tidak nyata terhadap anaknya yang menyebabkan anak tersebut akan tidak sekolah dan terlantar (DePanfilis, 2006). Selain itu menurut DiLauro (2004) orang tua yang memiliki pendidikan rendah biasanya berasal dari keluarga yang memiliki level sosio-ekonomi lebih rendah dibandingkan mereka yang berpendidikan.

d) Kepala Rumah Tangga (KRT) Muda

Orang tua muda/remaja berhubungan dengan masalah kesehatan ibu dan anaknya, kemiskinan, kurangnya pendidikan, kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi, berisiko tinggi pada anak (DePanfilis, 2006).

e) Orang tua Tunggal pada KRT Wanita

Orang tua tunggal memiliki risiko lebih tinggi dalam menelantarkan anaknya, khususnya orang tua tunggal wanita (Evans dkk, 2008). Fakta yang ada, anak dengan orang tua tunggal berisiko 77% lebih tinggi untuk mengalami penelantaran dibandingkan anak dengan orang tua lengkap (Bolen, dkk., 2008). Rumah tangga dengan kepala keluarga wanita lebih berisiko untuk jatuh ke dalam jaring kemiskinan. Jenis pekerjaan wanita memiliki pendapatan yang biasanya jauh lebih kecil dibandingkan pria. Selain dalam pendapatan, seorang wanita yang bekerja akan memiliki waktu yang sedikit untuk mengawasi anak dan memastikan kebutuhannya terpenuhi atau tidak (De Panfilis, 2006).

f) Status Ekonomi Rendah

Seorang anak dari rumah tangga miskin sekitar 3,24 kali lebih berisiko telantar dan kemungkinan besar menjadi anak tidak sekolah dalam rumah tangga tersebut (Sidebotham, 2006).

g) Orang tua Tidak Bekerja

Kemiskinan dan tidak bekerja menunjukkan hubungan yang kuat dengan anak tidak sekolah. Fryer dan Miyoshi (1996) dalam penelitiannya di daerah pedesaan Colorado menemukan ketika terdapat kejadian yang memengaruhi perekonomian lokal seperti gagal panen, meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak.

b. Strategi Menjaring ATS kembali ke Satuan Pendidikan

Proses menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke sekolah, dalam prakteknya tidak mudah. Meskipun demikian seiring dengan dilaksanakannya Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan menjangkau anak tidak sekolah, maka penjangkauan dan penjangkauan anak tidak sekolah perlu terus diupayakan, walaupun secara bertahap. Oleh karena itu diperlukan inovasi mekanisme penjangkauan dan penjangkauan anak tidak sekolah yang dapat membantu agar anak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya.

Terdapat beberapa rekomendasi mekanisme untuk menjaring anak tidak sekolah di mana TKPK dapat berperan aktif. Salah satu mekanisme yang dapat diusulkan adalah dengan memanfaatkan data awal

yang telah tersedia. Sumber data pertama adalah data dalam BDT yang dikelola oleh TNP2K dan kedua, data dalam basis data yang tersedia di tingkat daerah, antara lain Dapodik Kemendikbud dan E-MIS Kemenag yang keduanya dapat diakses di daerah. Mekanisme penjangkauan dan penjangkauan anak tidak sekolah dengan menggunakan data dimaksud akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Mekanisme penjangkauan anak tidak sekolah dapat juga menggunakan informasi dari pihak sekolah non Dapodik dan data dari lembaga kursus. Data tersebut kemudian dikomunikasikan dengan masyarakat dan otoritas terdekat dengan masyarakat, misalnya kantor desa/kelurahan. Rekomendasi mekanisme penjangkauan anak tidak sekolah dengan memanfaatkan data yang telah ada tersebut merupakan usulan mekanisme penjangkauan yang ideal dan dapat dicoba diterapkan di daerah dan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah Daerah dapat terus mengupayakan dan mencoba alternatif strategi lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing lokasi studi.

Mekanisme yang diusulkan dengan menggunakan data awal dalam hal ini adalah pertama menggunakan data awal dari BDT dan kedua, menggunakan data awal dari Dapodik dan/atau E-MIS. Adapun usulan mekanisme penjangkauan/pengembalian anak ke lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah kembali bersekolah dengan cara:

1) Menggunakan data awal dari Basis Data Terpadu (BDT)

TKPK Daerah (dengan melibatkan Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag) melakukan validasi lapangan anak tidak sekolah berdasarkan data anak tidak sekolah dari BDT dengan berkoodinasi bersama Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama/Kankemenag tingkat Kabupaten/ Kota (menggunakan kuesioner uji petik rumah tangga). Validasi juga dapat melibatkan aparat desa/kelurahan setempat atau anggota komunitas yang dapat diandalkan, misalnya guru, kader posyandu, tenaga kesejahteraan sosial yang bertempat tinggal di komunitas di mana data anak tidak sekolah berada.

2) Menggunakan data pendidikan di tingkat sekolah/madrasah

Mekanisme kedua dalam menjangking dan menjangkau anak tidak sekolah yang diusulkan adalah validasi dengan menggunakan data awal pendidikan yang ada di tingkat daerah, antara lain Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbud dan tersedia hingga tingkat sekolah atau data E-MIS yang dikelola oleh Kemenag.

c. Minat Siswa Melanjutkan Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “minat berarti kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, keinginan”. Melanjutkan berarti “meneruskan dari satu jenjang ke jenjang lainnya” (Poerwodarminto, 1996), misalkan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan menurut (pasal 18 UU RI No 20 Th 2003) adalah “lanjutan pendidikan dasar yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)”. Jadi yang dimaksud minat melanjutkan adalah kesukaan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang merupakan lanjutan pendidikan dasar.

d. Putus Sekolah

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar di usia sekolah. Artinya adalah berhentinya pendidikan anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Secara umum faktor penyebab putus sekolah ada dua hal yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri siswa sendiri yaitu karena; malas dan kemampuan akademik yang rendah, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, jarak sekolah jauh, dan lingkungan (Fitriana Nur, 2015).

Dari beberapa faktor penyebab putus sekolah, PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara

ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Untuk memperoleh data sasaran penerima PIP atau Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 6-21 tahun yang dikarenakan putus sekolah, akan dilakukan pendataan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan non formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Dalam rangka percepatan pendataan, Ditjen PAUD dan Dikmas memberikan bantuan pendanaan pendataan ATS kepada Tim Pendataan ATS di Kabupaten/Kota (Juknis Pendataan Dikmas).

e. Mekanisme pelaksanaan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan sebagai berikut: 1. UPT menyampaikan pelaksanaan pendataan ATS ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Satuan pendidikan nonformal, dan organisasi mitra di

lokasi studi kerjanya melalui berbagai kegiatan dan media yang tersedia; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan pelaksanaan pendataan ATS ini kepada satuan pendidikan nonformal dan organisasi mitra di lokasi studi kerjanya melalui berbagai kegiatan dan media yang tersedia.

2) Pembentukan Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota

Pembentukan Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut: a) Dinas Pendidikan menetapkan Tim Pendataan ATS dengan unsur seperti di atas dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; b) Jumlah Tim Pendataan ATS disesuaikan dengan jumlah sasaran dan lokasi studi pendataan; c) Tim Pendataan ATS diketuai oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi yang membidangi pendidikan kesetaraan dan/atau pembinaan kursus dan pelatihan; d) Susunan Tim Pendataan ATS terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penginput Data dan Petugas Pendataan.

3) Pengajuan Tim ATS kabupaten/kota ke UPT

Dinas Pendidikan mengajukan Tim ATS Kabupaten/kota dan bantuan pelaksanaan pendataan ATS ke UPT dengan melampirkan: 1. Surat Keputusan Pengangkatan Tim; 2. Copy rekening bank atas nama Tim; 3. Rencana Anggaran Biaya.

4) Penetapan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama

PPK UPT menetapkan penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota yang disahkan oleh Kepala UPT selaku KPA; Ketua Tim Pendataan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerja sama pendataan ATS dengan PPK UPT.

5) Pencairan Dana

a) Tim Pendataan ATS yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuka rekening bank pada bank pemerintah yang terdekat;

b) Pencairan dana ke KPPN dilakukan berdasarkan Surat Keputusan PPK yang sudah diketahui oleh Kepala PP/BP PAUD dan Dikmas dengan dilengkapi : 1) Perjanjian Kerja sama 2) Berita Acara Pembayaran (BAP) 3) Pakta Integritas 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) c. KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana bantuan langsung ditransfer ke rekening Tim Pendataan ATS Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sejumlah yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.

6) Pelaksanaan Pendataan dan Input Data ATS

Petugas pendataan lapangan melakukan pendataan ATS dengan melakukan pendaftaran ATS dengan menggunakan format terlampir. Petugas pendataan lapangan dapat menghubungi Kepala Desa/Lurah/UPTD Dinas terkait pada kelurahan/desa setempat; Pengurus RW, Pengurus RT, dan ATS/Keluarga ATS; 2. Petugas Penginput

Data melakukan input data ATS pada Aplikasi Data Peserta Didik ATS dengan alamat website <http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ats>; 3. Tim ATS Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pendataan sebagai pertanggung jawaban teknis maupun keuangan sesuai dengan format terlampir.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

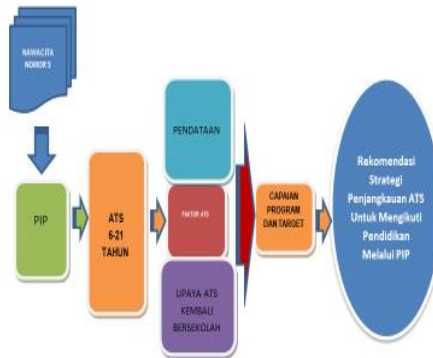
Hasil Penelitian Fitriana Nur Itsnaini UNY 2015 dengan judul Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Di Sekolah Dasar Kota Yogyakarta Kotagede 4, SDN Islamiyah Pakualaman dan SDN Dalem di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah di SD didominasi oleh faktor internal anak, yaitu karena malas untuk melanjutkan sekolah, disebabkan faktor faktor ekonomi keluarga dan kemampuan akademik yang rendah. Rendahnya kemampuan akademik ini terindendentifikasi dari seringnya siswa tinggal kelas, sehingga malu untuk melanjutkan sekolah dan lebih suka bekerja membantu keluarga. Upaya yang dilakukan orangtua memberikan motivasi agar tetap sekolah dengan mendaftarkan mereka untuk Kejar Paket A (Itsnaini, 2015).

Hasil penelitian Noor Rizqa Universitas Lampung tahun 2014 dengan judul Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Tingkat SMP Di Desa Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 menunjukkan faktor penyebab anak putus sekolah pada tingkat SMP di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tahun 2014, sebagai berikut : Sebanyak 86,4% orang tua anak putus sekolah pada tingkat SMP tergolong dalam kategori berpendapatan rendah. Sebanyak 86,4% kepala keluarga anak putus sekolah pada tingkat SMP memiliki jumlah anak dalam keluarga yang tergolong banyak. Sebanyak 77,3% kepala keluarga anak putus sekolah tergolong dalam kriteria memiliki pendidikan yang

rendah. Jarak antara tempat tinggal anak putus SMP ke sekolah keseluruhan lebih dari 5 km.

Hasil analisis Pusat Data dan statistik Pendidikan tahun 2016 tentang anak tidak sekolah berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa beberapa alasan yang menyebabkan anak usia 7-15 tahun putus sekolah atau tidak melanjutkan adalah alasan ekonomi dan bekerja untuk mencari nafkah membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara kajian lainnya anak putus sekolah, berdasarkan pengamatan, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, faktor budaya, fasilitas belajar kurang, ketiadaan sekolah/sarana, dan cacat atau kelainan jiwa. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata anak yang putus sekolah lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, diikuti secara berturut-turut faktor minat anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah, fasilitas belajar yang minim, budaya, ketiadaan sekolah, dan kelainan jiwa/cacat (Yuda 2012).

F. Kerangka Pikir



Gambar 1 : Konsep dan Kerangka Pemikiran

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sebagai bentuk perwujudan Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Indonesia Pintar diharapkan dapat meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop-out*). Sasaran KIP ada dua yaitu 1) untuk anak yang ada di sekolah dan 2) untuk anak yang ada di luar sekolah. Anak yang tidak sekolah itu jumlahnya pada usia 6-21 tahun tersebut ternyata masih cukup besar sehingga diperlukan pendataan yang lebih sistematis sehingga ATS tersebut bisa mendapatkan layanan pendidikan kembali. Namun demikian yang menjadi permasalahan utamanya adalah bagaimana agar dapat mengajak mereka untuk kembali ke

sekolah, dan fakta yang ada saat ini dan dirasa sangat sulit adalah untuk menemukan di mana anak yang tidak sekolah tersebut berada. Oleh karena itu permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian, karena masih banyaknya anak yang belum bisa dipetakan keberadaannya agar mereka bisa kembali ke sekolah formal atau ke non formal. Untuk itu diperlukan strategi pendataan yang efektif bagi ATS agar ATS yang belum mendapatkan layanan Pendidikan bisa kembali ke SPNF melalui Program Indonesia Pintar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *descriptive research* yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang telah berjalan saat ini serta bagaimana strategi pendataan ATS agar ATS tersebut mendapat layanan pendidikan di lembaga non formal. Kajian ini dilakukan untuk memperoleh masukan guna menyempurnakan program PIP yang lebih efektif di masa depan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang penggalan datanya melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) dan juga pengisian kuesioner.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi ini adalah Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) di seluruh lokasi studi Republik Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah pejabat/petugas pendataan di Dinas Pendidikan dan pimpinan/penanggungjawab SPNF di kabupaten/kota yang terpilih untuk mewakili seluruh Indonesia dengan asumsi terdapat ATS disetiap daerah sampel yang memiliki jumlah cukup banyak.

C. Teknik Pengambilan Sampel

1. Penentuan sampel Kabupaten/Kota

Penentuan sampel dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan penentuan sendiri atau sengaja di pilih berdasarkan pertimbangan banyaknya data ATS,

banyaknya peserta didik memiliki KIP dan memiliki KPS. Pemilihan daerah sampel secara purposive dimaksudkan untuk menjangkau informasi secara langsung baik keterlaksanaan, fenomena-fenomena dan faktor-faktor penghambat pendataan ATS serta motivasi peserta didik mengikuti pendidikan di SPNF serta strategi yang dilakukan daerah dan SPNF dalam menjangkau ATS agar mengikuti pendidikan lewat SPNF.

Pertimbangan pemilihan kabupaten/kota sampel lainnya adalah berdasarkan letak geografis daerah yang mewakili lokasi studi Barat, Tengah dan Timur. Tahap pertama dalam pemilihan sampel adalah dengan mengurutkan dari jumlah terbanyak ATS berdasarkan provinsi. Data berikut merupakan jumlah ATS di setiap provinsi di Indonesia.

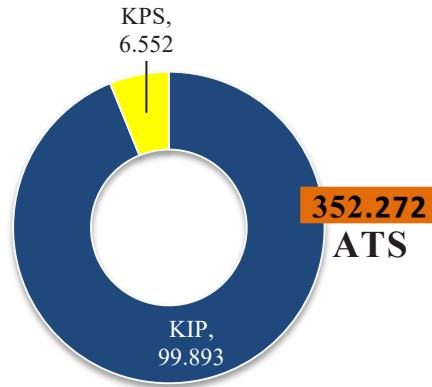
Tabel 3.1 Rekapitulasi Anak Tidak Sekolah di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah ATS	Jumlah yang memiliki KIP	Jumlah yang memiliki KPS
1	Prop. D.K.I. Jakarta	1,654	38	1
2	Prop. Jawa Barat	48,664	20,679	557
3	Prop. Jawa Tengah	46,288	8,831	1,574
4	Prop. D.I. Yogyakarta	1,835	512	136
5	Prop. Jawa Timur	37,789	20,259	587
6	Prop. Aceh	11,631	4,28	311
7	Prop. Sumatera Utara	10,754	843	597
8	Prop. Sumatera Barat	9,685	1,657	270
9	Prop. Riau	5,77	457	53
10	Prop. Jambi	8,203	1,729	19
11	Prop. Sumatera Selatan	8,879	1,168	86
12	Prop. Lampung	13,333	1,952	382

No	Provinsi	Jumlah ATS	Jumlah yang memiliki KIP	Jumlah yang memiliki KPS
13	Prop. Kalimantan Barat	4,218	437	2
14	Prop. Kalimantan Tengah	5,684	160	27
15	Prop. Kalimantan Selatan	11,754	4,716	161
16	Prop. Kalimantan Timur	3,417	816	5
17	Prop. Sulawesi Utara	6,274	90	73
18	Prop. Sulawesi Tengah	8,251	2,66	201
19	Prop. Sulawesi Selatan	19,866	8,396	324
20	Prop. Sulawesi Tenggara	10,043	1,117	211
21	Prop. Maluku	1,313	15	1
22	Prop. Bali	3,207	220	30
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	19,781	10,128	69
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	14,43	1,061	244
25	Prop. Papua	6,691	3	0
26	Prop. Bengkulu	6,819	937	37
27	Prop. Maluku Utara	1,726	297	33
28	Prop. Banten	5,018	1,431	100
29	Prop. Bangka Belitung	86	1	0
30	Prop. Gorontalo	7,147	522	112
31	Prop. Kepulauan Riau	2,814	37	50
32	Prop. Papua Barat	4,082	24	0
33	Prop. Sulawesi Barat	8,268	4,319	262
34	Prop. Kalimantan Utara	888	99	37
35	Luar Negeri	0	0	0
36	Hong Kong	0	0	0
	Total	356,272	99,893	6,552

Sumber: Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, 2017

Secara grafik digambarkan sebagai berikut:



Grafik 3.1. Rekapitulasi ATS di Indonesia

Tahap selanjutnya setelah mengurutkan jumlah ATS terbanyak hingga terkecil, lalu dipilih provinsi yang jumlah ATS nya cukup banyak serta mempertimbangkan letak geografis berdasarkan lokasi studi Barat, Tengah dan Timur. Data berikut merupakan sampel provinsi yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan tersebut.

Tabel 3.2 Provinsi lokasi/sasaran penelitian

No	Provinsi	Jumlah ATS	Jumlah yang memiliki KIP	Jumlah yang memiliki KPS
1	Prop. Jawa Barat	48.664	20.679	557
2	Prop. Jawa Timur	37.789	20.259	587
3	Prop. Sumatera Barat	9.685	1.657	270
4	Prop. Gorontalo	7.147	522	112

Setelah sampel provinsi terpilih, lalu dipilih lagi kabupaten/kota dalam masing-masing provinsi terpilih tersebut berdasarkan pertimbangan banyaknya jumlah ATS, penerima KIP dan kepemilikan KPS serta dengan mempertimbangkan letak geografis kabupaten/kota tersebut. Data berikut merupakan daerah Kabupaten/kota terpilih sebagai sampel penelitian.

Tabel 3.3 Kab/Kota lokasi/sasaran penelitian

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Jumlah ATS	Jumlah yang memiliki KIP	Jumlah yang memiliki KPS
1	Kab. Bogor	Jawa Barat	16,692	13,789	113
2	Kota Surabaya	Jawa Timur	798	46	9
3	Kota Padang	Sumatera Barat	873	112	10
4	Kab. Gorontalo	Gorontalo	2,419	252	66

2. Penentuan Sampel Lembaga Pendidikan

Dari masing-masing kabupaten/kota sampel terpilih, ditentukan sampel lembaga secara purposif dengan kriteria terbanyak terdapat jumlah ATS yang terdaftar di lembaga tersebut. Alasan pemilihan secara purposif dengan kriteria terbanyak ATS adalah untuk mengetahui bagaimana pendataan ATS tersebut serta apakah ada ATS yang belum memperoleh KIP. Namun demikian penentuan sampel lembaga ini akan dikoordinasikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota terpilih sebagai sampel.

3. Pemilihan Responden

Studi ini akan memilih pejabat dinas pendidikan, petugas bagian pendataan ATS di dinas pendidikan, dan pimpinan/penanggungjawab lembaga Satuan Pendidikan

Non Formal (SPNF) sebagai responden. Pemilihan ketiga kelompok responden ditujukan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pendataan ATS serta faktor-faktor penyebab putus sekolah dan motivasi peserta didik untuk masuk ke dalam SPNF.

Responden dinas pendidikan adalah kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat di bidang PAUD dan Dikmas. Pemilihan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau pejabat di bidang tersebut ditetapkan sebagai responden dengan pertimbangan mereka mengetahui arah/regulasi dan kebijakan pendataan ATS di kabupaten/kota. Responden Petugas Pendataan ATS adalah staf atau petugas di dinas pendidikan yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh Pejabat Dinas Pendidikan untuk menginput atau mendata ATS. Penunjukan Petugas pendataan ATS tersebut diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Pendataan ATS yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud. Sedangkan pimpinan/penanggungjawab SPNF ditetapkan sebagai responden dengan pertimbangan bahwa mereka adalah yang mengusulkan dan mendata ATS ke dinas pendidikan.

D. Teknik Pengambilan Data

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ATS dan manfaat KIP. Oleh karena itu data pada penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik penyebaran kuisioner dan wawancara kepada responden serta pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Pelaksanaan DKT ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam kepada responden tentang permasalahan-permasalahan, kendala atau hambatan serta

faktor-faktor yang mempengaruhi pendataan ATS serta pemanfaatan KIP oleh peserta didik dalam SPNF.

Dengan demikian, jumlah peserta DKT yang akan dihimpun dalam pertemuan diskusi tersebut adalah :

Tabel 3.4 Jenis dan Jumlah Peserta DKT per kabupaten/kota

No.	Peserta DKT	Jumlah
1.	Pejabat Dinas Pendidikan	3 orang
2.	Petugas Pusat	3 orang
3.	Pimpinan/Penanggungjawab SPNF	9 orang
4.	Peserta Didik	6 orang
Total		21 orang

Sementara, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut Program Indonesia Pintar dan ATS, hasil-hasil penelitian yang relevan dari perpustakaan maupun media daring, serta laporan evaluasi pelaksanaan pendataan ATS dari Kemendikbud.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik statistika deskriptif. Teknik statistika deskriptif digunakan untuk mentabulasi, menghitung, dan menampilkan distribusi frekuensi untuk setiap item kuesioner dengan format pertanyaan/pernyataan tertutup. Output analisis statistika ini akan menampilkan frekuensi setiap aspek permasalahan dan faktor-faktor penentu dalam pendataan ATS.

Sementara, seluruh data yang terkumpul melalui kuesioner dengan format pertanyaan terbuka dan DKT, akan dianalisis menggunakan teknik *directed content analysis*, yaitu peneliti

menggunakan kerangka konsep ATS dan Program Indonesia Pintar untuk mengeksplorasi berbagai kendala dan capaian pelaksanaan pendataan ATS.

Tahapan teknik *directed content analysis* dimulai dengan mengidentifikasi berbagai kata kunci dalam data yang diperoleh dari DKT dan kuesioner format pertanyaan terbuka. Identifikasi kata kunci ini kemudian akan diverifikasi menggunakan teknik *qualitative factor analysis* (QFA). Seluruh kata kunci yang teridentifikasi, akan dipetakan dan disajikan ke dalam diagram kartesius untuk mempertegas temuan yang diperoleh melalui kuesioner format pernyataan tertutup.

Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari dua teknik analisis (distribusi frekuensi + diagram kartesius, dan qualitative faktor analisis + diagram kartesius) tentang implementasi pelaksanaan pendataan ATS. Kompilasi kedua teknik analisis diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lengkap, baik secara statistis (kuantitatif) maupun secara deskriptif (kualitatif).

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendataan ATS

Pelaksanaan pendataan ATS secara umum telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Pendataan ATS 2017 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Paud Dikmas. Umumnya pelaksanaan pendataan ATS dilakukan oleh tim pendataan yang telah dibentuk oleh Dinas pendidikan setempat dengan melibatkan unsur seperti SKB, PKBM, dan LKP. Mekanisme pendataan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah (*door to door*) berdasarkan data dari Direktorat dan juga dari kelurahan RT/RW setempat.

Hasil verifikasi data di empat daerah studi, masih belum semua ATS dapat terdata dari seluruh jumlah ATS yang ada. Namun demikian ada dua daerah studi yang sudah berhasil mendata ATS melebihi target pendataan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Paud Dikmas, seperti halnya di Kabupaten Gorontalo dan Kota Bogor.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo melalui tim pendataan telah melakukan pendataan dengan sasaran ATS usia 6-21 tahun yang tidak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal. Semua pendataan ATS yang dilakukan TIM telah melampaui sasaran dan target ATS. Target ATS yang didata di Kabupaten Gorontalo yakni sebanyak 2000 anak, dari 6000 sasaran/target di 6(enam) kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Ini menunjukkan bahwa target sebanyak 2000 ATS di Kabupaten Gorontalo melebihi rata-rata target di 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Kendati targetnya paling besar, namun hasil pendataan yang berhasil didaftar di Kabupaten Gorontalo ternyata melebihi target tersebut yakni sebanyak 2400 anak (Tabel 4.1). Diakui bahwa sebanyak 2400

ATS yang terdata tersebut belum mencakup semua ATS yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi masih banyak ATS yang belum terdata.

Pencapaian pendataan yang melebihi target tersebut karena peran SKB dan para penilik Dikmas yang bekerjasama dengan PKBM dan Balai Pembina Kegiatan Belajar yang berada di beberapa desa. Ada 3 (tiga) SKB di Kabupaten Gorontalo yang membawahi lokasi studi kerja di 19 kecamatan dan 205 desa. Setiap SKB secara regular telah melakukan pendataan ATS, sehingga data ATS telah dimiliki oleh SKB sesuai lokasi studi kerjanya. Program pendataan ATS yang dicanangkan oleh Dirjen Paud Dikmas tetap dilaksanakan untuk memvalidasi data di lapangan, baik melalui kelurahan/desa maupun ke RT/RW dan langsung pada siswa/orangtua siswa. SKB Limboto, misalnya mengerahkan sebanyak 13 tenaga pamong dan administrasi kantor SKM berhasil mendata dan memvalidasi sebanyak 489 ATS di 4 kecamatan dari 7 kecamatan yang menjadi lokasi studi kerjanya. Jadi belum semua kecamatan dan desa ATS didata. Demikian pula SKB Limboto, baru mendata ATS di 4 Kecamatan dari 6 kecamatan yang menjadi lokasi studi kerjanya. Disampaikan bahwa baru sekitar 50% desa dari 4 kecamatan tersebut yang berhasil didata dengan jumlah ATS 530 siswa. Dari jumlah ATS tersebut hanya 344 ATS yang dilaporkan dan dimasukkan dalam Dapodik Dikmas Kabupaten Gorontalo, sedangkan selebihnya tidak disampaikan ke dinas untuk didata lebih lanjut. Ini dilakukan mengingat dalam perhitungannya telah melebihi target pendataan ATS yang ditentukan.

Tabel 4.1 Sasaran/target dan realisasi pendataan di
Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo.

No	Kabupaten	Jumlah ATS	Jumlah yang memiliki KIP	Jumlah yang memiliki KIP	Sasaran ATS (Juknis)
1	Kab. Boalemo	1,036	84	24	710
2	Kab. Gorontalo	2,419	252	66	2.000
3	Kab. Pohuwato	952	25	7	820
4	Kab. Bone Bolango	642	24	0	620
5	Kab. Gorontalo Utara	792	52	0	680
6	Kota Gorontalo	1,306	85	15	1.170
	Total	7,147	522	112	6.000

Kendati hasil pendataan melebihi target, namun tidak semua unsur tim dilibatkan dalam pendataan. Dalam petunjuk teknis pendataan disebutkan bahwa untuk memperoleh data sasaran penerima PIP atau Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 6-21 tahun yang dikarenakan tidak melanjutkan atau putus sekolah, dilakukan secara terkoordinasi dalam Tim dengan melibatkan Dinas pendidikan kabupaten/kota dan lembaga pendidikan non-formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Di dalam pendataan ini Ditjen PAUD dan Dikmas memberikan bantuan pendanaan pendataan ATS kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis bantuan pendataan ATS tahun 2017. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan penjelasan dari pimpinan LKP sekaligus sebagai ketua LKP serta perwakilan PKBM, mereka tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam Tim pendataan di Kabupaten Gorontalo. Dari penelusuran lebih lanjut, unsur yang dilibatkan dalam Tim pendataan ialah SKB dan perwakilan Pengawas Dikmas sebagai

UPT dan aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Oleh sebab itu, baik LKP belum mengajukan calon peserta didik dari ATS yang terdata baik pemegang KIP maupun bukan pemegang KIP untuk memperoleh bantuan pendanaan PIP. Kendati telah terdata ATS yang melebihi target, namun ATS tersebut belum ada yang diprogramkan untuk direkrut di lembaganya dan memperoleh dana PIP.

Sosialisasi tentang kegiatan pendataan ATS dilakukan di UPT PP/PB PAUD Dikmas Di Kabupaten Gorontalo bersamaan dengan Tim Pendataan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota lainnya. Dari Dinas pendidikan Kabupaten Gorontalo tidak semua unsur tim pendataan hadir. Unsur yang hadir dan dilibatkan dari SKB, penilik Dikmas dan PKBM serta beberapa pejabat dari Dinas Pendidikan kabupaten Gorontalo. Sosialisasi menjelaskan tentang tujuan pendataan ATS, teknis dan mekanisme pelaksanaan pendataan ATS serta hal-hal lainnya sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis pendataan ATS.

Selain Dinas Pendidikan pendataan ATS dilakukan juga oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo memiliki program pendataan untuk Anak Putus Sekolah miskin yang tidak sekolah karena alasan bekerja membantu orangtua. Pada tahun ini terdata ada 649 Anak Putus Sekolah. Selanjutnya dari jumlah tersebut diseleksi menjadi 60 anak yang benar membutuhkan bantuan sosial untuk dilatih dan dibimbing (Diklat) PPK dan PPH selama satu bulan. Selain itu mereka dicarikan orangtua asuh untuk membiayai pendidikan di Paket C. Ini merupakan Proyek Percontohan yang berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan serta kelangsungan pendidikan melalui orangtua asuh yang bersedia membantu membiayai pendidikan dan menampungnya untuk dapat bekerja secara mandiri.

Lain halnya di **kota Padang**, pendataan ATS belum dapat menjangkau seluruh ATS yang ada, mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Pendataan ATS di kota Padang

sudah dilakukan setiap tahun oleh SKB, dimana SKB tersebut sejak bulan April 2017 menjadi SPNF (Satuan Pendidikan Non-Formal). Saat ini data ATS yang sudah terdaftar dan sudah belajar di satuan pendidikan non-formal sebanyak 800 siswa. Hasil pendataan ATS yang dilakukan oleh Tim pendataan dengan melibatkan 16 PKBM, sebanyak 500 ATS, sedangkan target/sasaran pendataan ATS yang ditetapkan Direktorat Paud Dikmas berjumlah 590 ATS. Ini menunjukkan bahwa masih banyak ATS yang belum terdata dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi salah satunya dikarenakan terbatasnya jumlah tim pendata. Terkait dengan hal tersebut Dinas Pendidikan dan SKB akan terus berupaya untuk mendata seluruh ATS di lokasi studinya dengan berkoordinasi dan bantuan kelurahan serta akan melibatkan juga RT/RW setempat.

Mekanisme pendataan ATS di Kota Padang dibagi menjadi 2 lokasi studi pendataan yaitu SPNF lokasi studi I dan lokasi studi II. SPNF lokasi studi 1 membawahi 6 kecamatan dan lokasi studi II membawahi 5 kecamatan. Hasil FGD yang disampaikan oleh peserta untuk SPNF lokasi studi I, dan II, mekanisme pendataan yang dilakukan dengan cara “*door to door*” yang melibatkan dari berbagai unsur tim pendata yaitu dari, dinas pendidikan, SKB, LKP dan PKBM.

Berdasarkan hasil diskusi SPNF lokasi studi II menyatakan bahwa tim pendataan di kota Padang tampaknya belum terkoordinasi dengan baik, hal ini terindikasi dari keberadaan SK Tim Pendataan yang belum diterima sampai sudah dimulainya untuk melakukan pendataan. Selain itu juga tidak ada jadwal pelaksanaan pendataan, serta proses pendataannya tidak terstruktur dengan baik. Selain itu juga terlihat kurang koordinasi antar tim pendata yang terdiri dari PKBM, SPNF lokasi studi satu, SPNF lokasi studi II, pengawas, dan Dinas Pendidikan, dimana hasil pendataannya dibuat secara masing-masing, tidak saling melengkapi. Sebagai contoh hasil pendataan di lokasi studi 2 tercatat 142 ATS yang berasal dari

6 kecamatan, sementara lokasi studi I hanya terdata 76 ATS di satu kecamatan dari 5 kecamatan di lokasi studinya. Hasil verifikasi data ATS yang mencapai angka 500 ATS diduga bukan merupakan jumlah hasil rekapitulasi dari seluruh lokasi studi pendataan, karena seluruh tim data di kota Padang, tidak mengetahuinya dengan pasti. Artinya ada kemungkinan data-data belum terekap dengan baik dari seluruh lokasi studi pendataan yang dilakukan oleh tim pendataan.

Sementara itu hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, data ATS yang berkaitan dengan anak jalanan dan anak terlantar yang termasuk usia sekolah tidak diketahui dengan pasti. Menurut Dinas Sosial dari hasil diskusi terdapat 995 anak terlantar, namun jumlah 995 tersebut belum jelas asalnya dari mana, apakah merupakan bagian dari 800 siswa yang sudah terdaftar di dinas pendidikan Kota Padang atau bukan.

Peserta Diskusi dari SKB lokasi studi II juga banyak menyampaikan keluhan tentang pendataan yang telah dilakukan, khususnya terkait dengan tindaklanjut pasca pendataan karena banyak ATS yang didata menanyakan kapan bisa dapat memperoleh dana dan dapat bersekolah lagi, karena beberapa orang yang telah didata sebelumnya sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. Sementara dari LKP juga menyampaikan di lembaganya terdapat 7 warga belajar yang telah diusulkan ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan PIP sampai sekarang belum menerima dananya.

Pendataan ATS di **Kota Surabaya**, sudah lebih baik dibandingkan dengan pendataan yang dilakukan di Kota Padang, karena tampaknya pendataan ATS dapat berjalan lancar dan terkoordinir dengan baik. ATS yang terdata berjumlah 800 ATS dari yang ditarget kan oleh Direktorat yaitu sebanyak 1280 ATS. Sasaran/target pendataan ATS untuk tingkat Provinsi berjumlah 38.000 ATS. Keberadaan ATS tersebar hampir di semua kabupaten/kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, Dinas pendidikan Kota Surabaya mengeluarkan

kebijakan program ATS yang disebut dengan program bina warga belajar. Program ini dimaksudkan untuk membantu anak usia sekolah yang tidak mendapatkan layanan pendidikan, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikannya seperti anak jalanan. Program bina warga belajar saat ini sudah terdata 100 anak hasil *outreach* masuk kejar paket A dan B. Program bina warga belajar di fokuskan ke PKBM bukan pada LKP.

Hasil pendataan ATS yang diusulkan untuk mendapatkan dana KIP/melalui jalur KIP ternyata masih ada yang belum didaftarkan ke PKBM. Hal ini dikarenakan pembelajaran siswa di PKBM dikenakan biaya untuk SPP per pertemuan. ATS diharuskan untuk membayar SPP setiap pertemuan, sehingga pihak Pemkot Surabaya belum berani ambil resiko untuk mendaftarkannya ke PKBM. Namun demikian ada juga ATS yang sudah mendaftarkan atas inisiatif PKBM-nya. Persoalan ini sangat memerlukan perhatian, karena disatu sisi PKBM memerlukan biaya operasional dalam proses pembelajaran sementara dalam juknis PIP komponen untuk SPP tidak termasuk dalam komponen PIP, dan hanya untuk komponen biaya pribadi/personal. Namun menurut penjelasan dari Direktorat Kursus Kemdikbud cukup melegakan karena SPP dapat didanai dari BOP kejar paket. Meski demikian hal ini tampaknya belum dapat menyelesaikan masalah karena usulan BOP kejar paket sudah diajukan terlebih dulu daripada pihak Disdik memasukkan data ATS, sehingga waktunya menjadi tidak sinkron. BOP itu sendiri juga ada sistem kuotanya. Artinya tidak seluruh ATS dan anak kejar paket bisa dimasukkan karena terkendala dengan kuota yang ada.

Pendataan ATS yang dilakukan oleh Dinas Sosial tampaknya juga cukup berhasil. Dinas Sosial berupaya merangkul berbagai pihak untuk ikut dalam program ATS atau yang disebut program pendampingan ATS. Salah satunya dari civitas akademika yang dalam hal ini adalah perguruan tinggi melalui mahasiswanya

untuk melakukan pendampingan kepada anak bermasalah sosial, utamanya anak putus sekolah dan rentan putus sekolah. Oleh karena itu dari hasil FGD, beberapa responden menyatakan bahwa salah satu kunci untuk mengembalikan masa depan anak – anak tersebut adalah dengan mengembalikan mereka ke sekolah dimana mereka akan mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Selain itu, untuk bisa mempertahankan supaya mereka tetap di sekolah dan memiliki perilaku yang lebih baik, maka mereka butuh sosok pendamping yang dapat dijadikan panutan atau *role model*. Sosok pendamping tersebut dapat membimbing dan mengarahkan perilaku mereka untuk menggantikan peran keluarga yang selama ini menghilang.

Dinas Sosial melihat penanganan ATS ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk pendampingan mengingat jumlah perguruan tinggi di Surabaya banyak dan masing – masing perguruan tinggi memiliki jumlah mahasiswa yang banyak. Selain pertimbangan jumlah mahasiswa yang besar, rentang usia antara mahasiswa dengan anak yang akan di dampingi tidak terlalu besar sehingga tidak akan terjadi *generation gap*. Hal ini akan sangat membantu dalam proses pendampingan khususnya untuk pendekatan dalam upaya mengembalikan ke sekolah dan merubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan masyarakat di lingkungannya. Menjadi kewajiban mahasiswa memberikan upaya terbaik di sela – sela waktu kuliah mereka untuk mengupayakan perbaikan masyarakat sekitarnya.

Selain di Kabupaten Gorontalo dan Kota Surabaya, pendataan ATS di Kabupaten Bogor juga cukup berhasil. Pelaksanaan pendataan ATS di Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan forum PKBM dan Penilik. Tim pendataan mendatangi desa-desa di lokasi studi pendataan dengan “*door to door*”. Kabupaten Bogor merupakan daerah yang banyak

ATS nya. Data ATS yang ada saat ini sekitar 16.870, walaupun kuota pendataan ATS hanya 3.570. Pendataan ATS 2017 yang dilakukan oleh tim pendataan dari 68 PKBM dan Penilik sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 sudah berhasil mendata sebanyak 16000 ATS. Jumlah tersebut tentunya sudah melebihi target/sasaran yang ditentukan. Keberhasilan pendataan ini juga tidak terlepas dari pemenuhan persyaratan dalam pengusulan ATS. Artinya meski berhasil menjangring ATS yang cukup banyak, namun persyaratan usulan tetap menjadi dasar utama mereka dalam mengusulkan untuk mendapat dana KIP. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, pertama, adanya kartu indonesia pintar, kedua kartu keluarga, dan ketiga ijazah pendidikan terakhir. ATS yang punya kartu Indonesia pintar tidak memiliki ijazah, akan ditempatkan di Paket A.

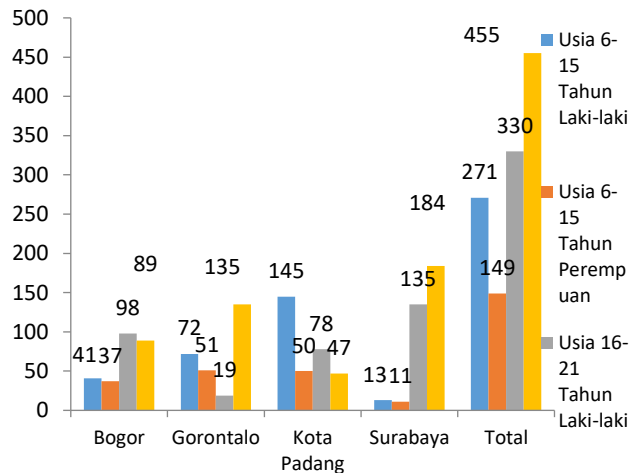
Daerah pendataan yang banyak ATS nya di kabupaten Bogor yaitu di Bogor Barat, yang terdiri dari 14 kecamatan. Di data statistik daerah tersebut ditandai dengan warna merah. Warna merah berarti merupakan daerah miskin. Kecamatan yang paling tinggi ATS nya ada sekitar 3.500 yaitu di kecamatan Cigudeg. Sedangkan ATS yang paling sedikit ada di Bogor Timur, di kecamatan Gunung Putri, hanya sekitar 352 ATS.

1. Karakteristik ATS Berdasarkan Kelompok Umur

Data jumlah ATS penerima PIP tahun 2017 berdasarkan kelompok usia 6-21 tahun di lokasi studi sebanyak 1.205 anak. Jumlah penerima KIP pada kelompok usia ini tentu saja masih jauh persentasenya, jika dibandingkan dengan jumlah ATS di lokasi studi yang telah terdata (19.700). Artinya jumlah ATS tersebut baru sekitar 6,2 persen yang mendapat bantuan dana PIP. Untuk lokasi studi Kabupaten Bogor jumlah penerima KIP kelompok usia 6-21 sebanyak 265 siswa, yang terdiri dari kelompok usia 6-15 sebanyak 78 siswa dan kelompok usia 16-21 sebanyak 187 siswa. sementara hasil pendataan ATS tahun 2017 untuk lokasi studi Kabupaten Bogor mencapai 16.000 ATS. Hal ini

berarti jikadibandingkan antara jumlah ATS hasil pendataan dengan ATS yang diusulkan penerima dana PIP masih banyak yang belum diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana KIP. Dengan kata lain dana PIP baru dapat mengcover sebesar 1,6 persen dari seluruh jumlah ATS di Kabupaten Bogor.

Selanjutnya untuk lokasi studi di Kabupaten Gorontalo jumlah ATS penerima PIP berdasarkan kelompok umur 6-21 sebanyak 277 siswa, yang terdiri dari usia 6-15 tahun sebanyak 123 anak, dan usia 16-21 sebanyak 154 anak. Sementara hasil pendataan ATS usia 6-21 tahun untuk lokasi studi Kabupaten Gorontalo sebanyak 2.400 ATS. Jika dibandingkan antara jumlah ATS yang terdata dengan jumlah ATS penerima KIP baru sekitar 11,5% yang mendapatkan dana bantuan KIP. Begitu pula untuk lokasi studi di Kota Padang, jumlah ATS kelompok usia 6-21 tahun penerima KIP sebanyak 320 ATS. Sementara jumlah ATS pendataan 2017 sebanyak 500 ATS. Jika dibandingkan antara jumlah ATS penerima KIP dengan data ATS yang terdata di kota Padang maka sudah 64 persen dari total ATS sudah dibantu KIP. Jumlah ini tergolong yang terbanyak jika dibandingkan dengan lokasi studi lainnya. Sedangkan untuk lokasi studi Kota Surabaya jumlah ATS penerima KIP berdasarkan kelompok usia 6-21 sebanyak 343 anak, sementara untuk jumlah ATS hasil pendataan 2017 sebanyak 800 ATS. Jika dibandingkan antara jumlah ATS penerima KIP dengan jumlah ATS yang terdapat di lokasi studi kota Surabaya sudah sekitar 42,8 persen ATS mendapatkan dana bantuan KIP. Grafik berikut menjelaskan data jumlah ATS di lokasi studi yang diusulkan untuk mendapatkan KIP berdasarkan kelompok umur dan gender.



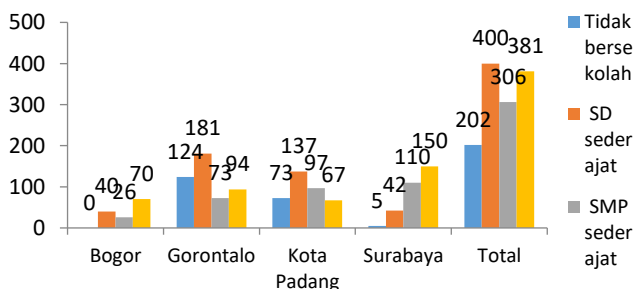
Grafik 4.1 Jumlah ATS berdasarkan kelompok umur

Berdasarkan hasil pendataan ATS tahun 2017 yang di kelompokkan menurut usia 6-21 tahun di empat lokasi studi berjumlah 19.700 ATS, dan data penerima KIP berdasarkan kelompok tersebut 1.205 ATS, maka jika dirata-ratakan penerima KIP untuk ATS di masing-masing daerah baru sekitar 6 persen. Namun jika dilihat pada masing-masing lokasi studi terdapat dua lokasi studi yang tergolong banyak ATS-nya yang menerima bantuan dana KIP dibanding lokasi studi lainnya, yaitu Kota Padang dan Kota Surabaya. Fakta ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak jumlah ATS yang belum mendapatkan/diusulkan untuk mendapatkan KIP. Hal ini di duga karena terbatasnya kuota yang ada yang diberikan untuk masing-masing daerah.

2. Karakteristik ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Data jumlah ATS penerima KIP yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir di lokasi studi

sebanyak 1.289 siswa. Dari jumlah tersebut penerima PIP paling banyak adalah pada jenjang SD sebanyak 400 siswa, pada urutan kedua jenjang SMA sederajat sebanyak 381 siswa, sedangkan yang paling sedikit tidak sekolah yakni sebanyak 202 siswa. Untuk lokasi studi di Kabupaten Bogor jumlah penerima KIP kelompok usia 6-21 sebanyak 136 siswa dengan rincian 40 SD, 26 SMP, dan SMA sederajat 70 siswa; Kabupaten Gorontalo jumlah ATS sebanyak 472 siswa dengan rincian, 124 tidak sekolah, SD 181 siswa (jumlah terbanyak), SMP 73 siswa, dan SMA sederajat 94 siswa; Kota Padang jumlah penerima PIP tahun 2017 sebanyak 374 siswa, dengan rincian 73 siswa tidak sekolah, 137 siswa SD (penerima terbanyak), 97 siswa SMP, dan 67 siswa SMA sederajat; dan Kota Surabaya jumlah terbanyak penerima PIP 2017 yaitu SMA sederajat 150 siswa, SMP 110 siswa, SD 42 siswa, serta yang tidak sekolah 5 siswa. Banyaknya ATS penerima PIP di jenjang SD pada kajian ini, menunjukkan terdapat kesamaan dengan beberapa hasil revidu yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga pada tahun lalu seperti BPS, PDSP, dan UNICEF yang menyatakan bahwa jumlah ATS terbanyak pada jenjang SD.



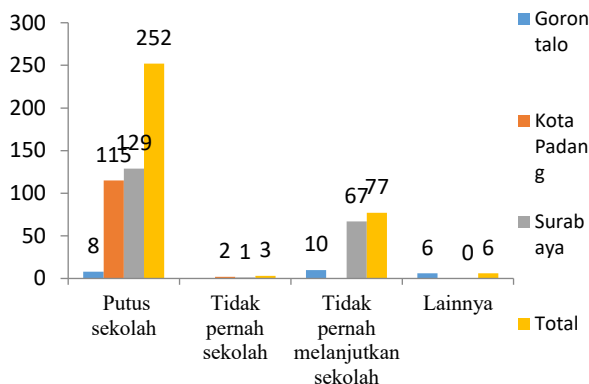
Grafik 4.1 Penerima PIP Tahun 2017 berdasarkan Pendidikan terakhir ATS

3. Karakteristik ATS Berdasarkan latar belakang status bersekolah

Jumlah ATS penerima KIP berdasarkan latar belakang status bersekolah di lokasi studi tampaknya bervariasi, seperti di Kota Surabaya dan Kota Padang rata-rata penerima KIP berasal dari siswa putus sekolah, sementara untuk Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bogor tidak melanjutkan sekolah dengan status berpendidikan terakhir SD sederajat, sedangkan untuk lokasi studi di Kabupaten Bogor dan Kota Surabaya yang terbanyak berpendidikan terakhir SMA sederajat. Dari ke-empat lokasi studi tersebut jika dirata-ratakan jumlah ATS terbanyak adalah berpendidikan SD sederajat (400 anak). Berdasarkan hasil diskusi dari pernyataan responden disebutkan bahwa banyaknya ATS yang putus sekolah pada jenjang SD di dua lokasi studi Kota Padang dan Kabupaten Gorontalo dikarenakan orangtuanya tidak mampu. Selain itu juga lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal. Sementara untuk Kabupaten Bogor dan Kota Surabaya relatif lebih baik dari sisi geografi dan penghasilan orang tua, sehingga banyak putus sekolah terakhir pada jenjang SLTA.

Pada konteks banyaknya jumlah ATS yang berpendidikan SD pada kajian ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti UNICEF yang telah disebutkan dalam penelitian terdahulu yang menyebutkan jumlah angka putus sekolah pada jenjang SD masing-masing cukup tinggi.

Berikutnya untuk lokasi studi di Kota Padang dan Kota Surabaya terbanyak adalah ATS karena Putus sekolah. Jika dirata-ratakan di seluruh lokasi studi jumlah yang terbanyak adalah ATS karena putus sekolah (252 orang), sedangkan yang tidak pernah sekolah jumlah sangat kecil hanya berjumlah 3 orang.



Grafik 4.3 Jumlah Penerima PIP berdasarkan Latar Belakang status bersekolah

Banyak jumlah ATS penerima PIP yang berasal dari siswa putus sekolah, juga telah sejalan dengan hasil reviu beberapa lembaga sebagaimana disebutkan di atas.

Terkait dengan kendala/hambatan dalam pendataan ATS yang disampaikan pada saat diskusi antara lain yaitu: (i) tidak semua ATS bersedia didata karena malu dan memang dari awal ingin keluar dari sekolah karena bekerja membantu orangtua di kebun atau mengasuh adik dan membantu pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan pekarangan, mencuci, memasak, dsb. Ini menyulitkan petugas pendaftar karena umumnya ATS dan orangtuanya tidak terus terang dan tertutup memberikan datanya; (ii) ATS dan orangtuanya saat didata tidak ada di rumah, sedang berkebun atau bepergian sehingga tidak memiliki informasi yang jelas; (iii) ATS yang akan didata ternyata sudah bersuami, sehingga mereka enggan memberikan informasinya, demikian pula petugas pendata menjadi ragu apakah perlu didata dan nanti akan diajak kembali untuk bersekolah dengan bantuan dana KIP; (iv) Sulit mengidentifikasi status kepemilikan KIP/KKS dsb, karena ada sejumlah KIP dan kartu yang

lainnya telah ditarik kembali oleh aparat desa/kelurahan dengan alasan kartu tersebut tidak digunakan untuk sekolah, jadi tidak ada gunanya memegang kartu tersebut. Selain itu, ada beberapa keluarga yang tidak ingat/ tidak tahu apakah memiliki KIP atau tidak. Kondisi ini menyulitkan pendata untuk menentukan status KIP ATS; (v) belum semua Kecamatan dan desa, bahkan RT/RW di lokasi dapat terdata karena petugas/SDM pendata yang kurang dibandingkan dengan luasnya lokasi dan kondisi geografis yang sulit, sedangkan waktu pendataannya dibatasi. Terlebih lagi lokasi yang berada di daerah terpencil, antar desa sangat berjauhan.

B. Faktor Penyebab ATS

Berdasarkan penelusuran dari ATS yang diundang dalam FGD dan keterangan para pimpinan lembaga SKB, LKP dan PKBM diperoleh informasi bahwa faktor yang menjadi penyebab ATS terutama ialah faktor ekonomi. Ini dapat diketahui misalnya dari pengakuan salah seorang responden ATS yang berusia 18 tahun, yang putus sekolah di SMA kelas 1 karena tidak memiliki cukup uang untuk biaya transport dan keperluan sekolah lainnya. Oleh sebab itu dia keluar dari sekolah dan saat ini mengikuti kursus komputer di LKP, namun belum memperoleh dana PIP. Demikian pula pengakuan dari responden ATS yang usianya 13 tahun dan putus sekolah di SD. Sebenarnya ia berkeinginan untuk sekolah, tetapi orangtuanya “susah” dari segi ekonomi dan sangat kekurangan secara finansial. Akhirnya siswa tersebut memutuskan keluar dari SD untuk membantu bertani (menanam jagung) di sawah dan sampai sekarang belum sekolah. Lain halnya dengan responden ATS wanita, berusia 14 tahun, ia tamatan SD dan saat ini baru masuk pendidikan kesetaraan Paket B di PKBM, namun belum memperoleh dana PIP. Pilihan untuk ke Paket B karena tidak pakai biaya dan waktunya dapat diatur agar tetap dapat membantu orangtuanya berkebun. Jadi hampir semua ATS

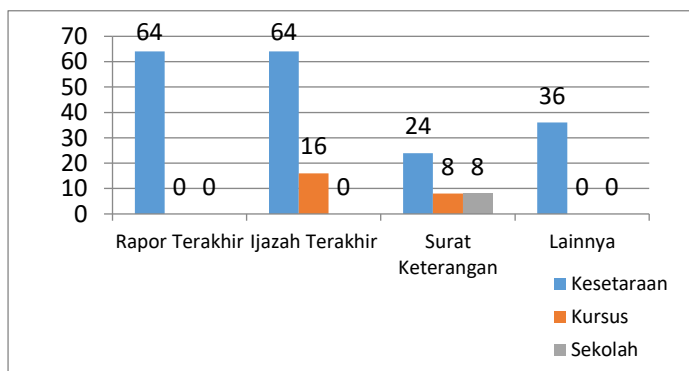
enggan bersekolah karena harus membantu orangtua bekerja baik di kebun, di rumah maupun pekerjaan rumah tangga lainnya untuk membantu keuangan keluarga yang terbatas.

Selain faktor ekonomi dan membantu keluarga berkebun, dalam FGD tersebut ada yang mengemukakan bahwa terjadinya putus sekolah juga karena pelayanan sekolah yang kurang menyenangkan. Pembelajarannya membosankan dan kurang menyenangkan anak dan terkadang terjadi konflik antar anak yang mengakibatkan anak sering enggan masuk sekolah dan menjadi putus sekolah. Beberapa anak meninggalkan bangku sekolah karena orangtuanya sakit atau meninggal dunia, sehingga anak harus menggantikan fungsi ayah/ibunya bekerja di kebun atau rumah tangga di rumah. Beberapa anak yang lain keluar dari sekolah karena malas, sakit dan akibat keluarga tidak rukun (*broken home*). Selain dari faktor ekonomi tersebut, faktor geografis juga menjadi penyebab/alasan ATS, karena jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh sehingga malas untuk pergi ke sekolah.

C. Upaya dan Motivasi ATS Kembali “Bersekolah”

Selain dari penyebab anak tidak mau bersekolah, penelusuran lebih lanjut dari hasil diskusi disampaikan beberapa alasan dari ATS yang ingin kembali bersekolah. ATS yang memiliki KIP maupun yang tidak memiliki KIP hampir semuanya bersedia untuk kembali sekolah atau ke lembaga pendidikan lainnya. Demikian pula semua lembaga pendidikan yang ada, seperti PKBM, LKP, dsb akan dengan senang hati menerima ATS kembali ke sekolah/SPNF atau lembaga Pendidikan lainnya. Hal ini, tentu saja dapat mudah terlaksana apabila ATS nantinya mendapat dukungan/memperoleh jaminan mendapatkan bantuan dana PIP. Selain itu juga ATS berharap hasil pendidikannya nanti dapat digunakan untuk memperoleh keterampilan agar bisa bekerja secara mandiri maupun sebagai karyawan pada lembaga usaha yang cocok dengan

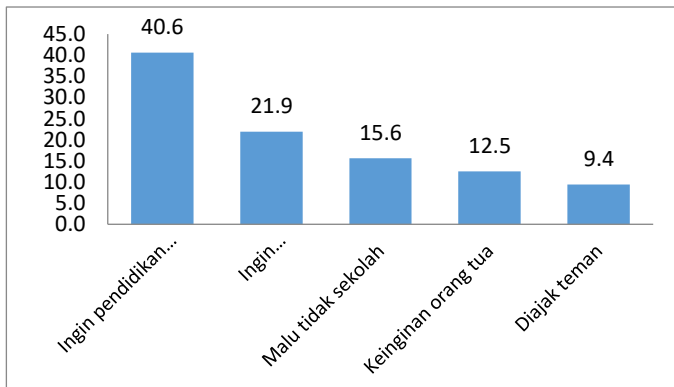
keterampilannya. Dana PIP diharapkan dapat membantu ATS untuk kembali ke sekolah tanpa memikirkan lagi biaya pendidikannya. Demikian pula PKBM maupun LKP perlu mendapatkan jaminan untuk memperoleh biaya pengelolaan terutama untuk menyelenggarakan pendidikan bagi ATS tersebut. Lembaga Pendidikan seperti PKBM, SKB, LKP atau Lembaga Pendidikan lainnya dalam menerima kembali ATS untuk masuk sekolah/SPNF memberikan persyaratan administrasi kepada ATS seperti rapor terakhir, surat keterangan atau ijazah terakhir. Pada grafik berikut ditampilkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ATS untuk dapat kembali bersekolah di pendidikan kesetaraan. Persyaratannya lebih besar dibandingkan di Lembaga kursus dan sekolah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh ATS yaitu ijazah dan rapor terakhir (64%).



Grafik 4.4 Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi ATS untuk kembali ke sekolah

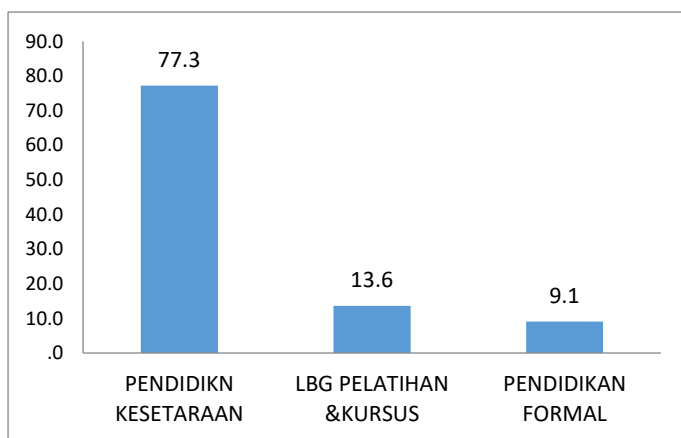
Informasi yang didapatkan dari hasil diskusi, mengungkapkan beberapa upaya yang harus dilakukan agar seluruh ATS dapat kembali mengikuti Pendidikan, dan pendampingannya antara lain yaitu (i) setiap lembaga Dikmas bekerjasama dengan orangtua dan perangkat desa, RT/RW, perlu mengajak,

mendorong dan memotivasi agar ATS kembali sekolah/ mengikuti pendidikan dengan jaminan ATS yang belum memiliki KIP nantinya akan mendapatkan KIP dan memperoleh dana PIP; (ii) perlu ada jaminan bagi lembaga Dikmas (PKBM, LKP dan SKB) akan memperoleh dana pengelolaan bagi siswa pemegang KIP yang memperoleh PIP dan mengikuti pembelajaran di lembaganya, (iii) bagi orangtua ATS yang tidak pernah sekolah perlu diberi pengertian mengenai manfaat pendidikan bagi anaknya yang tidak sekolah. Perlu dilakukan kerjasama dengan RT/RW dan perangkat desa lainnya agar bisa lebih meyakinkan keluarga tersebut, (iv) materi pembelajaran bukan sekedar bisa baca/tulis dan berhitung, melainkan juga pendidikan keterampilan dan kewirausahaan selain agar menarik juga lebih kontekstual sesuai kebutuhan anak dan keluarga untuk bekal berusaha kelak setelah menyelesaikan pendidikannya. Keterampilan alternatif yang diberikan antara lain membuat keripik pisang/keripik tempe, kue, menjahit dan tata boga atau beternak. Grafik berikut menggambarkan alasan utama dari ATS yang ingin kembali ke sekolah/SPNF.



Grafik 4.5 Alasan utama ATS ingin kembali bersekolah

Dari grafik tampak jelas sekali bahwa ada motivasi atau keinginan dari ATS (40,6%) untuk mengenyam Pendidikan lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ATS mempunyai aspirasi yang baik terhadap Pendidikan. Namun karena kondisi keuangan yang menjadikan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya, putus sekolah ataupun tidak pernah bersekolah. Selain adanya keinginan dari ATS untuk melanjutkan Pendidikan/bersekolah kembali, tampaknya jenis Pendidikan yang lebih banyak diminati ATS adalah pendidikan kesetaraan (77,3%) dibandingkan dengan Lembaga pelatihan dan kursus ataupun pada jalur pendidikan formal. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 4.6 Lembaga pendidikan yang diminati ATS

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil data dan informasi hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikut;

1. Pendataan

Pada umumnya Tim Pendataan telah melakukan pendataan dengan sasaran ATS usia 6-21 tahun yang tidak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pendataan ATS sebagai berikut;

- a. ATS masih banyak yang belum terdata, karena pendataan ATS yang dilakukan hanya berdasarkan target/sasaran yang sudah ditetapkan oleh Dir. Paud-Dikmas yang tercantum di lampiran Juknis ATS. Dari empat wilayah sampel, 2 wilayah telah mencapai target bahkan melebihi target pendataan yang telah ditentukan, yaitu di Kabupaten Gorontalo dan di Kabupaten Bogor, sementara dua wilayah lainnya belum mencapai target adalah kota Padang dan kota Surabaya. Belum tercapainya target di dua wilayah ini disebabkan oleh kondisi penduduk yang jumlahnya banyak sedangkan jumlah tim pendata dan waktu pendataan terbatas.
- b. Jumlah data ATS dilihat dari kelompok usia 6-21 tahun yang telah terdata di empat wilayah yaitu sebanyak 19.700 orang, sementara data ATS yang sudah masuk sebagai penerima PIP tahun 2017 sebanyak 1.205 siswa, jika dipersentasekan jumlah ini baru sekitar 6,2% ATS yang telah mendapat

bantuan PIP. Dari jumlah itu hasil pencapaian pendataan terbanyak adalah di Kabupaten Bogor yakni sebanyak 16.000 ATS, kabupaten Gorontalo 8000 ATS, Kota Surabaya 800 ATS, dan Kota Padang sebanyak 500 ATS.

- c. Jumlah penerima PIP tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir ATS terbanyak adalah tingkat SD yaitu sebanyak 400 siswa atau sekitar 33 persen, sedangkan yang paling sedikit tidak sekolah sekitar 16 persen. Jumlah penerima KIP ATS dilihat dari kelompok umur, terbanyak adalah usia 16-21 tahun yaitu sebanyak 785 orang atau 65%, dari jumlah penerima PIP kelompok usia 16-21 tahun itu terbanyak adalah perempuan yaitu sebanyak 455 orang atau 55% persen.
- d. Belum semua kecamatan dan desa, bahkan RT/RW di lokasi dapat terdata karena petugas/SDM pendata yang kurang dibandingkan dengan luasnya lokasi dan kondisi geografis yang sulit, sedangkan waktu pendataannya dibatasi. Lebih-lebih lokasi yang berada di daerah terpencil, dimana jarak antar desa sangat berjauhan.
- e. Target/sasaran ATS yang ditentukan dalam Juknis banyak yang tidak sesuai/tidak ditemukan lagi, seperti nama dan alamat yang sudah pindah, ATS-nya banyak yang sudah bekerja, menikah dan berusia di atas 21 tahun ketika pendataan dilakukan.
- f. Ditemukan beberapa daerah/kabupaten/kota yang merupakan daerah kantung ATS, rentan ATS dan berpotensi putus sekolah seperti di kabupaten Bogor yaitu daerah Kab. Bogor Barat, Kecamatan Cigudeg.

- g. Mekanisme pendataan dilakukan secara *bottom up*, dengan tim pendataan yang dibentuk sendiri dan tidak berdasarkan Juknis ATS yang ada.
- h. Pendataan ATS masih dilakukan oleh masing-masing dinas/unit terkait berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan program yang ada di unitnya, sebagai contoh di Kota Surabaya, Dinas Pendidikan melakukan pendataan ATS untuk program Bina Warga Belajar, atau Dinas Sosial melakukan pendataan untuk program *Campus Social Responsibility (CSR)*. Hal ini menyebabkan adanya *double counting* dalam pendataan.

2. Faktor-faktor Penyebab Anak Tidak Sekolah

Faktor penyebab ATS terbanyak adalah alasan ekonomi, biaya sekolah masih dirasa mahal bagi kalangan masyarakat kurang mampu, sehingga anak lebih baik bekerja untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor kedua alasan geografis, karena lokasi sekolah jauh dari rumah sehingga anak enggan untuk sekolah. Pendidikan/sekolah yang tidak menyenangkan/memuaskan. Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan sosial, banyak anak tidak mau sekolah karena pengaruh lingkungan seperti, pengaruh teman (pergaulan) dan menikah. Faktor ke empat adalah tidak adanya motivasi diri pada siswa, seperti karena kemampuan akademis rendah, serta kurangnya aspirasi pendidikan dari orangtua. Terkait dengan motivasi ATS untuk kembali bersekolah lebih banyak didorong dari keinginan diri sendiri untuk lebih mendapatkan layanan Pendidikan yang lebih tinggi agar masa depannya menjadi lebih baik dari orang tuanya. Selain itu juga ATS merasa

malu dan rendah diri karena tidak sekolah, bila melihat teman seusia yang bersekolah.

3. Upaya menarik ATS kembali ke sekolah

Upaya menarik ATS untuk kembali ke sekolah tidaklah mudah, walaupun telah disampaikan bahwa biaya sekolah gratis dan dibiayai oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan agar ATS dapat kembali mengikuti Pendidikan, dan pendampingannya antara lain yang perlu dilakukan sebagai berikut. (i) Setiap lembaga Dikmas bekerjasama dengan orangtua dan perangkat desa, RT/RW, perlu mengajak, mendorong dan memotivasi agar ATS kembali sekolah dengan memperoleh dana PIP; (ii) perlu ada jaminan bagi lembaga Dikmas (PKBM, LKP dan SKB) akan memperoleh dana pengelolaan bagi siswa pemegang KIP yang memperoleh PIP dan mengikuti pembelajaran di lembaganya, (iii) orangtua ATS memotivasi anaknya yang tidak sekolah bekerjasama dengan RT/RW agar anaknya bisa kembali sekolah (iv) materi pembelajaran bukan sekedar bisa baca/tulis dan berhitung, melainkan juga pendidikan keterampilan dan kewirausahaan selain agar menarik juga lebih kontekstual sesuai kebutuhan anak dan keluarga untuk bekal berusaha kelak setelah menyelesaikan pendidikannya. Keterampilan alternative yang diberikan antara lain membuat keripik pisang/keripik tempe, kue, menjahit dan tata boga atau beternak.

B. Saran Kebijakan

1. Pendataan ATS

Pada kondisi pemukiman yang padat dengan jumlah penduduk yang banyak dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, mekanisme pendataan perlu melibatkan berbagai pihak dengan teknik pendataan sebagai berikut.

- a. Direktorat Pauddikmas memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini walikota/bupati tentang pentingnya data ATS dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Mekanisme pendataan melibatkan pemerintah daerah baik dari segi teknik pendataan maupun dukungan dana.
- b. Direktorat membuat petunjuk teknis pendataan dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah (camat dan lurah/kades), PKBM, dan RT/RW.
- c. Pendataan terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan melalui data Dapodik.
- d. Perlu monitoring dan *update* data secara periodik

2. Upaya menarik ATS kembali ke sekolah

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ATS yang telah terdaftar mendapatkan bantuan dana dan dapat melanjutkan sekolah kembali.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin program bantuan dana kepada ATS akan terus berjalan, tidak berhenti di tengah-tengah jalan sebelum ATS menyelesaikan proses belajarnya.
- c. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan tempat belajar bagi ATS minimal 1 desa satu kelompok belajar dengan fasilitas yang memadai.
- d. Diperlukan komitmen dan konsistensi pemerintah dan pemerintah daerah secara berkelanjutan dalam pelaksanaan program.
- e. Saran yang dilakukan agar ATS dapat kembali mendapatkan layanan Pendidikan dapat diringkaskan

sebagai berikut yaitu; (i) melakukan pembinaan/pembimbingan atau pendampingan ATS untuk memotivasi, mengajak, mendorong ATS tsb untuk kembali mendapatkan layanan Pendidikan baik di satuan Pendidikan formal maupun non formal; (ii) mendatangkan psikolog atau motivator untuk memberikan dorongan kepada ATS yang mengalami kegagalan dalam sekolah/ATS yang memerlukan penanganan khusus atau malas untuk datang ke pembelajaran; (iii) melakukan pendekatan secara persuasif baik ke ATS maupun ke orang tua; (iv) mendatangkan alumni ATS yang berhasil dan sukses sebagai contoh/figur yang diharapkan bisa menimbulkan semangat dan motivasi ATS untuk berhasil seperti alumni lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Berbagai edisi. Statistik Indonesia. Jakarta: BPS.
- BPS. 1994. Penduduk Miskin dan Desa Tertinggal 1993 Metodologi dan Analisis, Jakarta.
- Bellinger, W. K. 2007. *The Economic Analysis of Public Policy*. Routledge. Oxon.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdiknas. 2010. Studi Evaluasi Dampak Pemberian Beasiswa di Indonesia. Jakarta: Puslitjak.
- Bolen, R. M., & Lamb, J. L., & Gradante, J. (2002). *The Needs-Based Assessment of Parental (Guardian) Support: A test of its validity and reliability*. *Child Abuse and Neglect*, 26, 1081- 1099.
- Connel-Carrick, Kelli. (2003). *A Critical Review of The Empirical Literature: Identifying Correlates of Child Neglect*. *Child and Adolescent Social Work Journal*.
- Child neglect: A guide for intervention*. Washington, DC: U.S.Department of Health and Human Services; Zuravin, S. J. (1991).
- Depdiknas. 2009. Pendidikan NonFormal, Jakarta: Depdiknas.
- DePanfilis, D. (2006). *Child neglect: A guide for prevention, assessment, and intervention*. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Administration on Children and Families,

Administration for Children, Youth, and Families,
Children's Bureau, Office on Child Abuse and Neglect.

DiLauro, M.D. (2004) Psychosocial Factors Associated with
Types of Child Maltreatment. *Child Welfare*, 83(1), pp
69–99.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah, 2010. Panduan Pelaksanaan BSM SMP.
Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 2012. Panduan
Pelaksanaan tahun 2012 Bantuan Khusus Murid
(BKM) Jenjang Pendidikan Menengah
(Dekonsentrasi). Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Dubowitz, H. (2006). Where's dad? A need to understand
father's role in child maltreatment. *Child Abuse and
Neglect*, 30, 461-465.

Evans, S. E., Davies, C., & DiLillo, D. (2008). Exposure to
domestic violence: A meta-analysis of child and
adolescent outcomes. *Aggression and Violent
Behavior*, 13, 131-140.

Fahmi, Mohamad & Marizka, Demy. 2014. *Analisis
Karakteristik Anak Tidak Bersekolah di Indonesia*.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.2
No.14.

Fryer dan Miyoshi (1996)

Itsaini, F. N. (2015). Identifikasi Faktor Penyebab Siswa
Putus Sekolah Di Sekolah Dasar Kota Yogyakarta
Kotagede 4, SDN Islamiyah Pakualaman dan SDN

Dalem di KotaYogyakarta
<http://eprints.uny.ac.id/FITRIANA>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar,
Dan Program Indonesia Sehat Untuk
Membangun Keluarga Produktif.

Tim Viva (2017). Faktor Penyebab Banyak Anak Indonesia Tak
Sekolah. Sumber: [http://www.viva.co.id/
gaya-hidup/parenting/faktor-penyebab-banyak-anak-
indonesia-tak-sekolah](http://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/faktor-penyebab-banyak-anak-indonesia-tak-sekolah).

Tarmizi, T. (ed.) (2016). 35,90 Persen Anak Tidak
Sekolah Karena Biaya. Sumber: [http://
www.antarane.ws.com/berita/ 603345/3590-persen-anak-tidak-
sekolah-karena-biaya](http://www.antarane.ws.com/berita/603345/3590-persen-anak-tidak-sekolah-karena-biaya).

CNN Indonesia (2017). Tingginya Angka Putus Sekolah di
Indonesia. sumber: [https://
student.cnnindonesia.com/
edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-
angka-putus-sekolah-di-indonesia/](https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/)

Kemdiknas. 2010, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
Nasional 2010 -2014. Jakarta: Kemdiknas

Koran Pendidikan. 2013. [http://headline.koranpendidikan.com/
view/3295/ pangkas-tuntas-angka-putus-
sekolah.html](http://headline.koranpendidikan.com/view/3295/pangkas-tuntas-angka-putus-sekolah.html), 26 Februari 2013

Koran Kompas 8 Mei 2017 sebanyak 2,9 juta siswa belum
terjangkau KIP.

Minujin, Alberto, et.al. (2005). Children Living in Poverty.
New York: Unicef.

- Maranoor dan Somashekarappa (2012). *Socio-Economic Determinants of School Dropout in North Karnataka*. Journal Sociology. Volume : 2. pp. 232-240.
- Machfoedz, I., dan Suryani, E. 2007. Pendidikan Kesehatan Bagian Dari Promosi Kesehatan. Fitrayama: Yogyakarta.
- Noor Rizqa Universitas Lampung tahun 2014 “ Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Tingkat SMP Di Desa Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Tahun 2014”
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 16 IPB/2012 Tentang Pencairan dan Penyaluran Dana BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 16 IPB/2012 Tentang Pencairan dan Penyaluran Dana BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2017 .
- Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2015
- Pusat Data dan statistik Pendidikan tahun 2016, analisis data anak tidak sekolah/anak putus sekolah berdasarkan hasil susenas.
- Poerwodarminto, W.J.S. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

- Sudarwati (2009). *Perbedaan Resiko Putus Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun pada Tahun 1998 dan 2006 di Indonesia* [Thesis]. Depok:Universitas Indonesia.
- Scannapieco, Maria and Kelli Connel-Carrick. (2006). Ecological Correlates of Neglects in Infants and Toddlers. *Journal of Interpersonal Violence* Vol. 21 No.3 Maret 2006. Pp:219-316.
- Sidebotham, P., Heron J. & The ALSPAC Study Team. (2006). Child Maltreatment in the “Children of The Nineties” : A Cohort Study of Risk Factors. *Victoria et.al. : Child Abuse & Neglect*, 30, 497-522.
- Sullivan, S. (2000). *Child neglect: Current definitions and models—A review of child neglect research, 1993-1998*. Ottawa, Canada: National Clearinghouse on Family Violence; Gaudin, J. (1993a).
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2012. Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, Buku Pegangan TKPK Daerah. Jakarta, TNP2K.
- Ulfatin, N. 2003. *Eksplorasi Kesenjangan Gender Pada Pendidikan Dasar Sampai Tinggi*. *Jurnal Penelitian Kependidikan*, Hal.101- 122.
- Trocmé, N., Nutter, B., MacLaurin, B., & Fallon, B. (1999). Child welfare outcome indicator matrix. Toronto, ON: University of Toronto: Bell Canada Child Welfare Research Unit. [http://www.mcgill.ca/files/crcf/OutcomesIndicatorMatrix. Pdf](http://www.mcgill.ca/files/crcf/OutcomesIndicatorMatrix.Pdf).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Woodhall, M. 1985, *Cost Analysis in Education*, Oxford:
Oxford University Press.

Widiastuti, Ari (2010). *Analisis Faktor Yang Memengaruhi
Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2008*
[Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wong D. L., & Huckenberry M.J. (2009). *Wong's Nursing care
of infants and children*. America.

Makrifah, Siti Anni. 2010. *Analisis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan
Ekonomi Provinsi Jawa Timur* [Thesis]. Bogor:IPB
Bogor.

Mastuhu, *Relevansi Pendidikan Dalam Pembinaan Dan
Pengembangan Sektor Informal, Analisis Pendidikan,*
Tahun II, No.4, Tahun 1982.

Yuda, D. C. K. (2012). *Penyebab Anak- Anak Putus Sekolah*.
Malang.

KAJIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP):

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sebagai bentuk perwujudan Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Tujuan kajian ini adalah untuk memperoleh bahan rekomendasi kebijakan mengenai strategi penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mengikuti pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dengan fokus analisis: (1) Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS); (2) Faktor penyebab ATS dan kembali ke sekolah; (3) Upaya dan motivasi Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali sekolah. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah descriptive research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang penggalan datanya dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan juga pengisian kuesioner.

Hasil kajian yang terkait dengan pendataan, pada umumnya Tim Pendataan telah melakukan pendataan dengan Sasaran ATS usia 6-21 tahun yang tidak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pendataan ATS tersebut. Sementara itu, kajian ini menemukan bahwa faktor penyebab ATS adalah alasan ekonomi, alasan geografis, pengaruh lingkungan sosial, dan tidak adanya motivasi diri pada siswa. Kajian ini memberikan saran kebijakan terkait pendataan ATS dan upaya menarik ATS kembali ke sekolah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

ISBN 978-602-0792-00-2

